



Rancangan Akhir

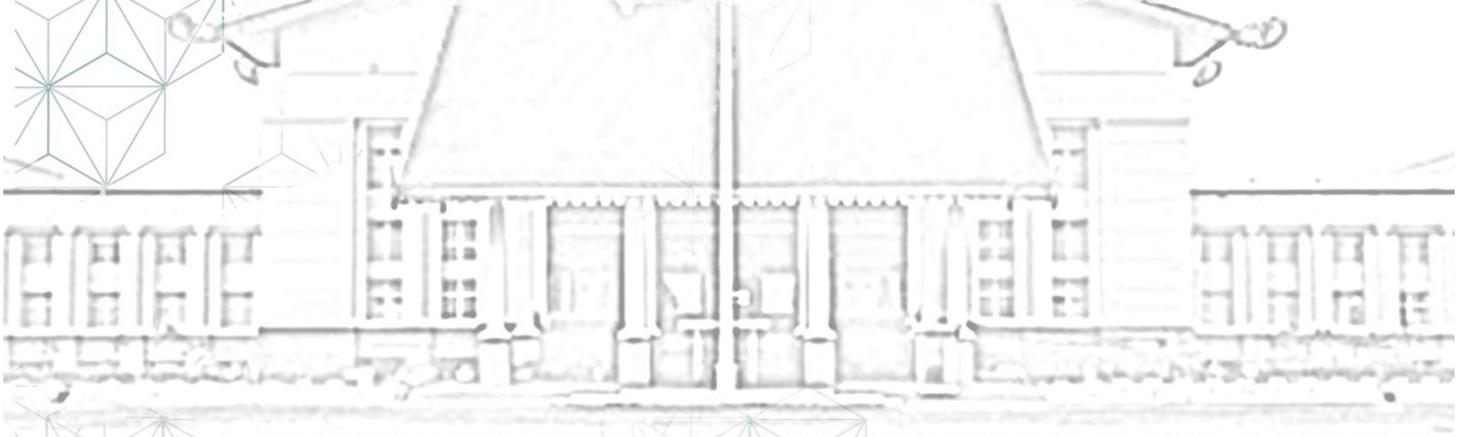
RENCANA KERJA

Perangkat Daerah

Tahun **2022**

2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD.....	43
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	61
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	68
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	69
4.1 Program dan Kegiatan	69
BAB V PENUTUP	102

DAFTAR TABEL

	Halaman
1	Perjanjian Kinerja Daftar Penetapan Hasil Penilaian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan 10
2	Kategori Capaian Kinerja Daftar Penetapan Hasil Penilaian Perkantoran Ramah Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 10
3	Rekapitulasi keikutsertaan Proklamasi di Kalsel pada tahun 2020 18
4	Rincian Balai Adat dan Kearifan Lokal 20
5	Rincian data MHA dan Kearifan Lokal yang telah teridentifikasi 20
6	Daftar Validasi KLHS dan Verifikasi RPPLH Tahun 2020..... 22
7	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020 Dinas LH 31
8	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020 UPT Laboratorium Lingkungan 37
9	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020 UPT TPAS Regional Banjarbakula 40
10	Realisasi Kinerja sesuai Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020..... 43
11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 43
12	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas LH Prov. Kalsel 48
13	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 UPTD Laboratorium Lingkungan 54
14	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula 56
15	Usulan Program dan Kegiatan dari Instansi Bidang Lingkungan Hidup di Kalsel 59
16	Sasaran Utama Pembangunan Nasional di Bidang Lingkungan Hidup .. 61
17	Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Kalsel 68
18	Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan DLH Prov Kalsel 2022... 70
19	Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan 2022..... 74
20	Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan UPT TPAS Regional Banjarbakula 2022 76
21	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas LH Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023..... 78

22	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	98
23	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPT D TPAS Regional Banjarbakula Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	100

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT dan didorong dengan semangat untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu bagian dari substansi perencanaan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dokumen Renja DLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 hanya berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, dan memuat isu-isu strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen dari DLH Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. Akhir kata semoga Renja DLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

KEPALA DINAS,

HANIFAH DWI NIRWANA, ST. MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19710321 199803 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja merupakan dokumen yang memuat penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada tingkat instansi. Renja berperan penting dalam setiap kinerja suatu perangkat daerah dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Renja Tahun 2022 merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022. Renja TA. 2022 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya berisi hasil yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dari perkembangan tersebut, kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2022. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja Tahun 2022 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 6065);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 66);
26. Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 067 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 67);
27. Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 0156 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah TPAS Regional Banjarbakula (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 0156).
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas LH Provinsi Kalsel Tahun 2022. Renja ini disusun untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen perencanaan satuan perangkat kerja daerah periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja 2022 adalah untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi dibidang pengendalian dampak lingkungan serta mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Selain itu bab ini juga memuat analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja; Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai dikaitkan dengan target renstra periode berjalan, dana indikatif tahun berjalan dan prakiraan maju.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis yang telah disusun. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2020, perkiraan capaian Tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Evaluasi Program Tahun 2020

Total pagu APBD Dinas LH Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2020 sebesar Rp. 9.855.138.700,- Realisasi belanja sebesar Rp. 9.408.674.520,- (95.47%). Sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.446.464.180,- (4.53%). Total pagu UPT Laboratorium lingkungan sebesar Rp.2.356.809.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.338.836.250,-, (99.23%). terdapat sisa dana sebesar Rp. 17.972.950,- (0.67%).Sisa anggaran berasal dari efisiensi kegiatan yang dilaksanakanAdapun untuk UPT TPAS Regional Banjarbakula T.A 2020 total pagu sebesar Rp.6.224.367.500,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp 5.615.787.167,-, (90.22%).Sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 608.580.333,- (9.78%). Sisa anggaran berasal dari efisiensi kegiatan yang dilaksanakan. Adapun total pagu keseluruhan untuk Dinas LH Prov Kalsel beserta UPT Laboratorium Lingkungan dan TPAS Regional Banjarbakula sebesar Rp.18.436.315.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.363.297.937,- (94.17%)

Dinas LH Provinsi Kalimantan Selatan didukung dengan dana APBN sebagai pelaksana tugas pembantuan restorasi gambut melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan sub kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran Berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-029.13.4.155108/2020,sebesar Rp. 2.900.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.826.467.100,- (97.46%).

Berikut merupakan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 2.312.844.200,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 2.202.928.259,- (95%)
- c. Output, tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menyangkut ketersediaan perangkat, materai, benda pos; jasa komunikasi air, listrik; jasa administrasi keuangan, peralatan dan bahan kebersihan kantor; Alat Tulis Kantor; barang cetakan dan penggandaan; komponen Listrik, air, dan telepon; Bahan bacaan surat kabar; logistik kantor, BBM,; makanan dan minuman; pelaksanaan koordinasi ke luar dan dalam daerah.
- d. Outcomes, presentase pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran dan kepegawaian ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Secara umum, kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi 100% seperti tahun-tahun sebelumnya.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 1.888.365.000,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 1.189.831.650,- (94%) .
- c. Output, tersedianya,peralatan dan perlengkapan kantor seperti laptop/Notebook,Printer, scanner, AC ,kamera, GPS, Meja dan Kursi Kantor; terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, pemeliharaan kendaraan sebanyak 23 unit.
- d. Outcomes, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas LH ditargetkan 100% dan terealisasi 99,96%, sehingga capaian kinerja sebesar 99,96%.

3. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dan Aset SKPD

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 5.750.000,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 5.716.500,- (99 %).

- c. Output, penyusunan laporan kinerja keuangan dan laporan aset. Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun ditargetkan sebanyak 4 laporan dan terealisasi sejumlah 4 laporan, dan Jumlah laporan aset yang dibuat ditargetkan 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
- d. Outcomes, Persentase aset yang tercatat 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD

- a. Pagu dana sebesar Rp. 279.541.650,-
- b. Realisasi keuangan Rp. 276.002.750,- (98.%).
- c. Output kegiatan, Pelaksanaan Rapat Teknis Bidang Lingkungan Hidup se Kab/ Kota dan Koordinasi Inventarisasi & Pengumpulan Data ke 13 kab/ kota, Dokumen RKA, RDPA, DPA, RKAP, RDPPA, DPPA, Renja, Perjanjian Kinerja Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Triwulan, LKPJ/LPPD, LKjIP
- d. Outcomes, predikat SAKIP di Tahun 2020 ini berdasarkan realisasi predikat SAKIP di Tahun 2019 yang diumumkan pada Bulan Agustus 2020, mendapatkan predikat A dengan nilai 81.97, sehingga capaian kinerja sebesar 102%.

4. Pembebasan Lahan dan Pengelolaan TPA Regional

5. Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan

- a. Jumlah dana sebesar Rp. 246.854.000,-
- b. Realisasi keuangan Rp. 239.508.700,- (97%).
- c. Output, Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan.
- d. Outcomes, Peningkatan jumlah sekolah adiwiyata 32 Sekolah

Terkait Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan untuk realisasi tahun 2019 tidak sampai 100% dimana untuk sekolah Adiwiyata Provinsi dimana untuk usulan dari Kabupaten/Kota hanya sejumlah 32 sekolah saja dan tidak semua Kabupaten/Kota melakukan pengusulan ke Tingkat Provinsi. Berbeda dari tahun 2019 dimana usulan ada sebanyak 82 sekolah dan menjadikan hal ini berpengaruh terhadap kecilnya jumlah sekolah yang lolos di Tingkat Provinsi yang mana pada tahun ini hanya 27 sekolah saja yang lolos

menjadi Sekolah Adiwiyata Provinsi, hal ini dikarenakan selain adanya Pandemi Covid-19 juga karena Adiwiyata memasuki masa transisi antara penerapan Permen lama dengan Permen yang baru. Sedangkan untuk kegiatan Adiwiyata ditingkat Nasional dan Mandiri dimana dikarenakan Pandemi Covid-19 maka Puslatmas dan PGL KLHK mengumumkan peniadaan pelaksanaan Penilaian Adiwiyata Nasional dan Mandiri di tahun 2020.

6. Peningkatan dan Pembinaan Kota Sehat/Adipura dan Pengelolaan Persampahan

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 1.672.795.600,-
- b. Realisasi keuangan Rp. 1.497.907.861,- (89 %)
- c. Output kegiatan, sosialisasi oordinasi/pembinaan/pengawasan pengelolaan sampah dan program Kota Sehat/Adipura di 13 kab/kota, 46 kantor yang dinilai dalam lomba kebersihan lingkungan perkantoran, Hadiah Pengelolaan sampah berbasis masyarakat,
- d. Outcomes, 8 Kab/Kota yang Mendapat Penghargaan sebagai Kota Bersih/Sehat, Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga 18.87% Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga 66.3%
- e. Program dan kegiatan terealisasi 100%

Dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk di Kalimantan Selatan semakin meningkat pula volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah dan berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Bahwa dalam rangka mencegah permasalahan dan dampak sebagaimana dimaksud, pengelolaan sampah dipandang perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu di tingkat Daerah agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Lomba Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk menggali kepedulian masyarakat Kalimantan Selatan terhadap upaya pengurangan sampah dan menjadikan sampah menjadi sumberdaya dan bernilai ekonomi serta ikut berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungannya dari sampah

khususnya di wilayah Banjarbakula. Peserta yang diikuti oleh Bank Sampah yang berbasis Masyarakat di wilayah Banjarbakula dengan tujuan pengurangan sampah yang masuk ke TPA Regional Banjarbakula atau hanya residu setelah dipilah di Bank Sampah. Para pemenang di wilayahnya akan menjadi contoh yang akan diikuti oleh pengelola bank sampah lain di masyarakat sehingga mampu mengurangi timbulan sampah yang dapat mencemari lingkungan.

Tabel 01. Daftar Penetapan Hasil Penilaian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan

No	NAMA BANK SAMPAH	KAB/KOTA	NILAI	PERINGKAT
1	Bank Sampah Benawa	Banjarbaru	82,83	I
2	Bank Sampah Kayuh Baimbai	Tanah Laut	81,50	II
3	Bank Sampah Al Jihad	Banjarmasin	81,00	III
4	Bank Sampah Aisyiah	Banjar	80,33	IV
5	Bank Sampah Asrama Militer	Barito Kuala	79,83	V

Selain itu juga diadakan Penilaian Perkantoran Ramah Lingkungan Tahun 2020 berkenaan dengan peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 097 Tahun 2020 tentang Perkantoran Ramah Lingkungan dan Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana di dalamnya bertujuan untuk memperbaiki dan menumbuhkan budaya dan perilaku peduli lingkungan hidup dan efektivitas dan efisiensi operasional perkantoran berwawasan lingkungan dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan.

Tabel 2. Daftar Penetapan Hasil Penilaian Perkantoran Ramah Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

NO	NAMASKPD	PERINGKAT
1	Dinas Kehutanan	I
2	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	II
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	III
4	Dinas Perindustrian	IV
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	V
6	Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu	VI

NO	NAMASKPD	PERINGKAT
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	VII
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	VIII
9	Dinas Sosial	IX
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	X
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	XI
12	Badan Keuangan Daerah	XII
13	Badan Kepegawaian Daerah	XIII
14	Dinas Perdagangan	XIV
15	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	XV
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	XVI

7. Pemantauan Kualitas Lingkungan

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 651.279.200,-
- b. Realisasi keuangan Rp. 651.075.700,- (99%).
- c. Output, pemantauan kualitas air sebanyak 13 sungai di 13 kab/kota, dan pemantauan kualitas udara ambient di 13 kab/kota
- d. Outcomes, Jumlah sungai Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yang dipantau kualitasnya pada tahun 2018 terealisasi 13 sungai dengan 76 sampel, pada tahun 2019 terealisasi 13 sungai dengan 76 sampel dan pada tahun 2020 terealisasi 13 sungai dengan 82 sampel sehingga capaian kinerja sebesar 100%, Jumlah Kab/Kota yang dipantau kualitas udaranya pada tahun 2018 terealisasi 13 Kab/kota dengan 78 sampel, pada tahun 2019 terealisasi 13 Kab/Kota dengan 78 sampel dan pada tahun 2020 terealisasi 13 Kab/Kota dengan 39 sampel sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Pada Tahun 2020, Seksi pemantauan lingkungan hidup telah mencapai target kinerja yang direncanakan, baik itu untuk pemantauan kualitas air dan kualitas udara. Semua tahap pemantauan telah dilaksanakan.

Pelaksanaan pemantauan kualitas air yang menggunakan dana APBD dilakukan oleh DLH Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan UPT Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kalsel sebagai Laboratorium penguji. Pemantauan dilakukan di seluruh kab/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 14 (empat belas) titik pantau menggunakan Dana APBN KLHK serta sebanyak 38 (tiga puluh delapan)

Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) kali. Pelaksanaan pemantauan kualitas air Sungai Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yaitu pada bulan Maret, April, Juli, Agustus, Oktober dan November. Namun untuk tahap 1, hanya dapat dilaksanakan pada sungai Cantung dan Sungai Batulicin, karena pada tahap I kegiatan terbatas akibat adanya pandemic covid 19. Jumlah parameter yang dipantau untuk seluruh titik pemantauan yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) dan jumlah titik pantau seluruhnya berjumlah 38 (tiga puluh delapan) dengan perincian adalah 4 (empat) titik di Sungai Martapura, 1 (satu) titik di Sungai Riam Kanan, 1 (satu) titik di Sungai Riam Kiwa, 3 (tiga) titik di Saluran Irigasi, 8 (delapan) titik di Sungai Negara, 1 (satu) titik di Sungai Amandit, 1 (satu) titik di Sungai Tapin, 4 (empat) titik di Sungai Barabai, 3 (tiga) titik di Sungai Balangan, dan 3 (tiga) titik di Sungai Tabalong, 3 (tiga) titik di Sungai Tabanio, 3 (tiga) titik di Sungai Batulicin, dan 3 (tiga) titik di Sungai Cantung.

Pelaksanaan pemantauan yang menggunakan dana APBN KLHK dilakukan oleh KLHK yang bekerjasama dengan pihak ketiga dan didampingi oleh Seksi Pemantauan DLH Provinsi Kalimantan Selatan. Pemantauan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di 14 (empat belas) titik pantau yaitu: Sungai Barito di Intake PDAM, Dermaga Mesjid Agung, Bantuil, Dermaga Simpang Arja, Dermaga Belawang, Dermaga Murung Keramat, Anjir Muara, Bawah Jembatan Barito, Ujung Panti, Pelabuhan Trisakti, Kuin Kecil, Pulau Kaget. Untuk Sungai Martapura di Kelurahan Mantuil dan Sungai Negara di Desa Lepasan.

Pada Tahun 2020, pemantauan kualitas udara menggunakan dana APBD dan APBN KLHK. Untuk pemantauan dengan dana APBD, Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan metode manual aktif selama 1 jam dengan lokasi 13 kab/kota oleh Dinas LH Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Laboratorium pengujian, Sedangkan kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan metode passive sampler dilaksanakan di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) tahap kegiatan, Pemantauan Kualitas Udara Tahap I (satu) dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 – 6 Agustus 2020 dan untuk Pemantauan

Kualitas Udara Tahap II (dua) dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 – 8 Oktober 2020.

8. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

- a. Pagu dana sebesar Rp. 153.400.000,-
- b. Realisasi keuangan Rp. 153.270.000 (99%)
- c. Output, pengawasan penataan pengelolaan lingkungan pada 32 perusahaan;
- d. Outcomes, 32 Perusahaan yang Bergerak di Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Industri di Kalimantan Selatan yang Diawasi Kebijakan Lingkungan Hidupnya

Pembinaan terhadap perusahaan yang dilakukan pada kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup pada 22 perusahaan. Perusahaan yang dibina pada kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH sebagian merupakan perusahaan yang juga di PROPER.

1. PT. Tunas Inti Abadi
2. PT. Conch South Kalimantan Cement
3. PT. Surya Satrya Timur
4. PT. Laskar Semesta Alam
5. PT. Dwi Guna Laksana
6. PT. Sebuku Tanjung Coal
7. PT. Adaro Indonesia
8. PT. Kalimantan Fishery
9. PD. Baramarta
10. PT. Candi Artha
11. PT. Citra Putra Kebun Asri
12. PT. Borneo Indobara
13. PT. Pola Kahuripan Inti Sawit
14. PT. Tri Buana Mas
15. PT. Jorong Barutama Greston
16. PT. Buana Karya Bhakti
17. PT. Kharisma Inti Usaha
18. PDAM Bandarmasih
19. PT. Putra Bangun Bersama
20. PT. Hasnur Jaya Utama

21. PT. Mitratama Perkasa (Asam-Asam)
22. PT. Amanah Anugerah Adi Mulia (Telsus)

Berdasarkan hasil pengawasan terdapat 22 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, terdapat 6 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 16 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lainnya masih tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

- a. Pagu dana sebesar Rp. 221.190.000,-
- b. Realisasi keuangan Rp. 217.467.100,- (98%).
- c. Output kegiatan, Pelaksanaan Sosialisasi, Penilaian dan Asistensi PROPER
- d. Outcomes, 86% dari 15 Perusahaan Presentase Perusahaan dengan Peringkat Kinerja Biru dan/atau hijau
- e. Program dan kegiatan terealisasi Masih Proses penetapan

Untuk Periode penilaian tahun 2020 telah dilakukan penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPERDA) sebanyak 16 Perusahaan yang meliputi Sektor/subsektor : Tambang Batubara, Terminal Khusus Batubara, Pabrik Kelapa Sawit, Energi PLTU, Energi distribusi, Pakan Ternak, Minyak Goreng, Industri Semen dan Jasa Rumah Sakit.

Sistem Peringkat Kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam 5 (lima) peringkat warna yaitu (emas, hijau, biru, merah dan hitam) yang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan yang meliputi aspek : Pemenuhan ketentuan dalam Dokumen / Izin Lingkungan; Pengendalian Pencemaran Air (PPA); Pengendalian Pencemaran Udara (PPU); Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3) dan Pengendalian Kerusakan Lahan (PKL) – khusus untuk usaha dan/ atau kegiatan pertambangan

10. Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

- a. Jumlah dana sebesar Rp. 643.765.400,-
- b. Realisasi keuangan Rp. 613.180.850,- (95%)

- c. Output kegiatan, pelaksanaan pengawasan bagi penghasil, pengumpul dan pemanfaat limbah B3
- d. Outcomes, persentasi jumlah perusahaan/RS/Instansi yang diawasi terkait limbah B3 ditargetkan 29 perusahaan/RS dan terealisasi 37 perusahaan/RS, sehingga capaian kinerja sebesar 128%. Indikator kedua yaitu persentasi jumlah dokumen terkait pembangunan incinerator yang dapat diselesaikan yang ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Perusahan pengumpul Limbah B3 yang diawasi pengelolaan Limbah B3-nya pada tahun 2019 ini diantaranya adalah: PT. Maju Asri Jaya Utama, PT. WGU. PT. Nazar dan CV. Barokah.

Pengawasan pengelolaan Limbah B3 medis pada tempat karantina dan pemusnah untuk tahun 2020 ini dilaksanakan diantaranya kepada fasilitas pelayanan kesehatan: Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, RS Umum Daerah Kotabaru

Perusahaan Pemanfaat/Pengolah Limbah B3 juga kami lakukan pengawasan, yaitu: PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong, PT. PLN Unit Pembangkit Asam Asam Kabupaten Tanah Laut dan PT. Indocement di Kabupaten Kotabaru

Perusahaan penghasil limbah B3 yang dilaksanakan pengawasan di tahun 2020 ini adalah ke: 1) PT. Tanjung Power Indonesia di Kabupaten Tabalong, 2) PT. Smart Refinery di Kabupaten Kotabaru, 3) PT. IMPT, 4) Jaffa, 5) PT. Conch, 6) Wahana Baratama Mining, 7) PT. Antang Gunung Meratus, 8) PT. Karias tabing Kencana, 9) PT. Sumber Kurnia Buana, 10) PT. Sime Darby Oils, 11) PT. Barito Galangan Nusantara, 12) PT. Aritmin Asam Asam, 13) PT. Bumi Jaya, 14). PT. Arutmin Indonesia Satui, 15). PT. Chel Jedang, 16). PT. Dharma Kalimantan Jaya, 17) Hotel Aston Tanjung, 18) Karisma Persada Alam, 19) PT. Indofood, 20) PT. Surya Sakti Dharma Kencana, 21) PT. Terminal Coal Tapin, 22) PT. Indonesia Bulk Terminal, 23) PT.Gawi Makmur Kalimantan, 24) PT. Duta Bahari Menara Line Dockyard, 25) PT. Kalimantan Energi Lestari.

11. Penanganan Kasus dan Penegakan Hukum LH

- a. Jumlah dana sebesar Rp.430.000.000,-
- b. Realisasi keuangan Rp. 389.776.100,- (90.65%).

- c. Output kegiatan, 2 Laporan Verifikasi Pengaduan/Non Aduan dan Penyelesaian Kasus LH serta verifikasi lapangan dan penyelesaian kasus hukum LH, , Pelayanan pengaduan melalui pos pengaduan selama 1 tahun
- d. Outcomes, Presentase penyelesaian kasus hukum (sanksi) LH yang ditindaklanjuti/diverifikasi ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 98,3%, sehingga capaian kinerja 98,3 %. Indikator kedua yaitu Presentase penyelesaian kasus LH yang di limpahkan pada pihak yang berwenang ditargetkan 100% dan terealisasi 98,5%, sehingga capaian kinerja 98,5%.

Pengaduan/penyelesaian kasus yang di tindak lanjuti/ di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Pencemaran Sungai Satui Kab. Tanah Bumbu.
2. Pencemaran Sungai Kusan Kab. Tanah Bumbu
3. Kerusakan terumbu karang Kab. Tanah Bumbu
4. PT. Sinar Nusantara Industries
5. PT. Prolindo Cipta Sarana
6. PT. Nazar Kab. Tanah Laut
7. KUD Karya Murni
8. PT. Yoltan Sari Indonesia
9. PT. Monrat Intan Barakat
10. PT. Agri Bumi Sentosa
11. PT. Borneo Indobara
12. Swiss-Belhotel Bandarmasin
13. RSUD Ulin Banjarmasin
14. PT. Surya Satria Timur
15. PT. Kalimantan Fishery
16. PT. Wahana Baratama Mining
17. PT. Perkebunan Nusantara XIII Kabupaten Tanah Laut
18. PT. Basirih Industrial
19. PT. Perkebunan Nusantara XIII Kabupaten Banjar
20. PT. Antang Gunung Meratus
21. PT. Palmina Utama
22. PT. Dwi Guna Laksana

23. PT. Semesta Central Mas
24. PD. Baramarta
25. PT. Sumber Kurnia Buana
26. PETI di PT. Antang Gunung Meratus

12. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

- a. Jumlah dana sebesar Rp. 457.510.400,-.
- b. Realisasi keuangan Rp. 457.332.250,- (99%)
- c. Output kegiatan, 1 Laporan koordinasi/monitoring dan pembinaan kampung iklim
- d. Outcomes, Persentase Emisi GRK yang dihitung ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja 100%, Indikator kedua yaitu Jumlah kampung iklim yang terbentuk ditargetkan 26 Lokasi dan terealisasi 55 Lokasi, sehingga capaian kinerja 211,54%.

Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Sejalan dengan komitmen nasional Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013. Dalam RAD-GRK Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan baseline atau business as usual (BAU-baseline), total emisi dari sumber berbasis lahan sebesar 107,13 Mt CO₂-eq (2011-2020); 26,344 Mt CO₂-eq (2010-2020) dari energi, transportasi dan industri; dan 6,481 Mt CO₂-eq (2010-2020) dari limbah. Sejalan dengan RAD tersebut, maka diperlukan kegiatan inventarisasi emisi GRK di setiap wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Untuk pembentukan kampung iklim terdapat peningkatan kinerja dari target yang direncanakan yaitu 26 lokasi dapat tercapai menjadi 55 lokasi kampung iklim. Hal ini karena pembinaan yang terus menerus dilakukan oleh Provinsi kepada institusi Kabupaten/ Kota dan masyarakat, berdampak pada meningkatkan pemahaman pihak Kabupaten/ Kota terhadap pentingnya pembentukan kampung iklim dalam mengantisipasi perubahan iklim. Selain itu, pemberian penghargaan kepada lokasi kampung iklim baik dari Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan serta dari Gubernur semakin meningkatkan motivasi pihak pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) serta masyarakat untuk melakukan dan meningkatkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Tabel 3.Rekapitulasi keikutsertaan Proklam di Kalsel pada tahun 2020

No	Nama Kabupaten/ Kota	Peringkat Penghargaan Proklam		
		Utama	Madya	Pratama
1	Kota Banjarmasin	2	12	
2	Kota Banjarbaru	2	2	
3	Kabupaten Banjar		1	1
4	Kabupaten Tanah Laut	3	3	
5	Kabupaten HSS		4	
6	Kabupaten HST			1
7	Kabupaten HSU	-	-	-
8	Kabupaten Tapin	1		
9	Kabupaten Balangan	1		1
10	Kabupaten Tabalong	1	3	
11	Kabupaten Barito Kuala	3		
12	Kabupaten Tanah Bumbu		9	1
13	Kabupaten Kotabaru	2	2	
	Total	15	36	4

13. Pengkajian, Evaluasi dan Pembinaan Teknis AMDAL

- a. Jumlah dana sebesar Rp. 180.000.000
- b. Realisasi keuangan Rp. 180.000.000,- (100 %).
- c. Output kegiatan . pengkajian Amdal Provinsi di 12 Kab/Kota dan 6 lisensi Komisi Penilai Amdal Kab/ Kota yang dikeluarkan
- d. Outcomes, 100% dokumen Lingkungan yang diproses, Komisi Penilai Amdal Kab/Kota yang Dievaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Izin Lingkungan
- e. Program dan kegiatan terealisasi 100%

Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RKL/RPL atau pun perusahaan yang akan melakukan perubahan izin lingkungan. DLH juga memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Komisi Penilai AMDAL (KPA) di Kabupaten/kota. Dari 13 kab/kota terdapat 12 Komisi Penilai Amdal aktif, 1 KPA tidak aktif.

Pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan

koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 anggaran yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan dilakukan pemotongan, sehingga kinerja untuk kegiatan pembinaan dan evaluasi di kabupaten/kota kurang maksimal. Namun demikian seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan.

14. Peningkatan Kapasitas SDM dan Peraturan LH

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 166.160.400 ,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 165.760.300,- (99 %)
- c. Output, Pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM LH yakni sebanyak 1 orang yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan bimtek. Sosialisasi melalui via zoom tentang sosialisasi MHA dan Kearifan Lokal target serta tatacara pembuatan SK dan Raperda Kabupaten sebanyak 2 kegiatan
- d. Outcomes, Pada Tahun 2020 target 6 Balai Adat, realisasi 9 Balai Adat (150 %). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan ASN 100 % serta sosialisasi 100 %, sosialisasi 2 Kegiatan realisasi 2 kegiatan (100 %),

Hasil dari Koordinasi Identifikasi & Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan target 6 Balai Adat dan realisasi sebesar 9 Balai Adat dan 10 Kearifan Lokal telah teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 4.Rincian Balai Adat dan Kearifan Lokal

No.	Kabupaten	Lembaga Adat	Target	Realisasi
1.	Kotabaru	- Sariajang - Bangkalan Dayak	1	2
2.	Tanah Bumbu	- Tamunih - Kuku Dampas	1	2
3.	Tapin	- Pipitak Jaya	1	1
4.	Hulu Sungai Tengah	- Kiyu	1	1
5.	Balangan	- Dayak Meratus - Tebing Tinggi	1	2
6.	Tabalong	- Upau - Haruai	1	1

Tabel 5.Rincian data MHA dan Kearifan Lokal yang telah teridentifikasi :

No.	Kabupaten/ Kecamatan/ Desa	Jumlah Balai	Yang Telah di Identifikasi Oleh Prov.
1.	Kec. Kusan Hulu Desa Gunung Raya & Kusan Hulu Desa Tamunih / Kab. Tanah Bumbu	5 Balai Adat	2 Balai Adat
2.	Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru	27 Balai Kecil 1 Balai Besar	2 Balai Adat
3.	Desa Uren Kab. Balangan	4 Balai Adat	2 Balai Adat
4.	Kec. Upau dan Haruai Kab. Tabalong	10 Balai Adat	1 Balai Adat
5.	Kec. Pipitak Jaya Kab. Tapin	9 Balai Adat	1 Balai Adat
6.	Kec. Bajuin Desa Tanjung	-	-
7.	Kab. HST Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang	26 Balai Adat	1 Balai Adat
8.	Kab. HSU Kec. Banyu Irang	-	-

15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam

- a. Jumlah dana sebesar Rp. 134.761.000,-
- b. Realisasi keuangan Rp. 132.682.700,- (98%).
- c. Output kegiatan, terkait kegiatan Kalpataru, Saka Kalpataru dan Duta Lingkungan Hidup adalah dimana untuk 2020 indikator berubah menjadi Institusi/dunia usaha/komunitas yang terlibat dalam pelestarian fungsi LH
- d. Outcomes, calon peserta Kalpataru dan karena regulasi dari KLHK yang menetapkan bahwa untuk mendapatkan Penghargaan Kalpataru

diharuskan telah mengabdikan dalam melestarikan Lingkungan Hidup minimal sudah 5 tahun sebelum akhirnya dapat diusulkan, untuk usulan Kalpataru di 2020 diusulkan 2 orang dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tapin, sedangkan untuk Saka Kalpataru telah dibentuk Kepengurusan untuk masa bakti 2020-2025.

Untuk kegiatan KSDA untuk pelaksanaan Kalpataru tahun ini usulan yang diusulkan belum berhasil menjadi penerima penghargaan Kalpataru hal ini dikarenakan kurangnya visualisasi terkait uraian dalam matriks usulan calon penerima penghargaan Kalpataru. Untuk Saka Kalpataru kendalanya ialah jadwal pengukuhan kepengurusan Saka Kalpataru di Dinas Lingkungan Hidup masih terus diperbaharui dikarenakan harus menyesuaikan jadwal di Kwarda yang juga terdapat kegiatan yang lain. Dan yang terakhir kegiatan Forum Komunitas Lingkungan kendalanya adalah kurangnya koordinasi terkait data kegiatan lingkungan pada institusi, dunia usaha dan komunitas lingkungan.

16. Implementasi Kebijakan KLHS

- a. Jumlah dana sebesar Rp. 67.860.400
- b. Realisasi Keuangan Rp. 67.854.300,- (99%).
- c. Output kegiatan, 1 Dokumen data Data Pelaksanaan KLHS (Monitoring, Reviu, dan Pelaporan) 100% Validasi KLHS Kabupaten/Kota. Jumlah pemetaan sumber pencemar 2 Sektor
- d. Outcomes, persentase validasi KLHS dan verifikasi RPPLH kabupaten/kota dapat terealisasi 100%. Ini berarti seluruh dokumen KLHS dan RPPLH yang diajukan oleh kabupaten/kota dapat divalidasi dan diterbitkan surat keputusan/persetujuan. Indikator ketiga yaitu persentase kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang dipetakan atau memiliki koordinat titik penataan atau lokasi pencemar air yang dapat dilakukan pemetaan sebanyak 2 sektor dari data yang diperoleh

Tabel 6 .Daftar Validasi KLHS dan Verifikasi RPPLH Tahun 2020

No	Kab/Kota	Perihal
1	Banjarmasin	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru 2020 – 2040
2	Tabalong	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024
3	Tabalong	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi (RDTR Dan PZ) Kawasan Perkotaan Tanjung Kabupaten Tabalong 2019 - 2039
4	Banjar	Verifikasi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
5	Tabalong	Verifikasi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong

17. Implementasi Kebijakan RPPLH

- a. Jumlah dana sebesar Rp. 255.021.850
- b. Realisasi Keuangan Rp. 255.019.300,- (100%).
- c. Output kegiatan, Jumlah dokumen PPLH yang diselesaikan
- d. Outcomes, jumlah dokumen PPLH yang dihasilkan yang ditargetkan 1 dokumen yaitu materi teknis pengelolaan jasa lingkungan provinsi Kalimantan Selatan dan terealisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Ini artinya seluruh dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dihasilkan dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.

18. PengelolaanLahan Gambut dan Akses Terbuka

- a. Jumlah dana sebesar Rp. 264.139.600,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 68.549.000,- 91%).
- c. Output Kegiatan,Identifikasi dan Inventarisasi Kerusakan Lahan Gambut 1 Dokumen dan 1 Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Akses Terbuka
- d. Outcomes, Luas lahan gambut rusak yang direstorasi ditargetkan 2.000 ha dan terealisasi seluas 2.000 ha, sehingga capaian kinerja sebesar

100%.sedangkan Luas Lahan akses terbuka yang diinventarisir ditargetkan 1 lokasi dan terealisasi 1 lokasi yaitu *Kabupaten Kotabaru* sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan pada Tahun 2020 yang dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan yang sudah ada pada Tahun 2019 yang bertujuan untuk pada Penguatan Data dan Informasi sebagai dasar pondasi untuk melakukan rencana-rencana aksi ke depannya.

Kegiatan Pengelolaan Lahan Gambut dan Akses Terbuka merupakan kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kegiatan ini adalah penggabungan dari kegiatan pengelolaan lahan akses terbuka dan pengelolaan ekosistem gambut yang dilakukan pada Tahun 2018 dan 2019 yang pada intinya kegiatan ini untuk mendukung peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Tujuan dari kegiatan pengelolaan lahan gambut adalah meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk secara bersama melakukan upaya-upaya me jaga gambut agar lestari. Sedangkan tujuan dari kegiatan pengelolaan lahan akses terbuka adalah terindetifikasinya jumlah lahan akses terbuka serta diperolehnya kualitas data dan informasi yang sama antar anggota dan wilayah. Sasaran kegiatan adalah tersedianya data dan informasi jumlah lahan akses terbuka di provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan pengelolaan lahan gambut sangat terkait dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang sangat mengemuka pada Tahun 2015. Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2015 mengalami kebakaran hutan dan lahan seluas 148.194 ha (luas kebakaran di lahan gambut seluas 18.665 ha dan non-gambut/mineral seluas 129.529 ha).(Sumber : Rancangan RPPEGD Tahun 2019). Untuk itu pengelolaan lahan gambut diarahkan untuk menjadi kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Pencegahan menjadi prioritas dalam penanggulangan kebakaran. Sebagai pondasinya masyarakat harus diberi pengetahuan yang cukup untuk mengelola gambut secara bijak. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan cukup menjadi perhatian, tak terkecuali di sekitaran Obyek Vital Nasional yaitu Bandara Syamsuddin Noor yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya pada musim kemarau. Kondisi demikian menjadi perhatian khusus bagi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui Operasional Pembasahan Lahan di sekitaran Bandara Syamsudin Noor yaitu di Kelurahan Syamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung Kota Banjarbaru. Selain pada pada Obyek Vital Nasional , operasional pembasahan lahan juga di laksanakan di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Terkait pengelolaan lahan akses terbuka, Hasil Inventarisasi Lahan Akses Terbuka Tahun 2016 yang dilakukan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan LAT KLHK RI di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 113 Lokasi LAT. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2020 melakukan identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut lokasi LAT yang berada pada 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotabaru berdasarkan data yang diberikan oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan LAT tersebut di atas dan juga data dari Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota setempat. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi Lahan Akses Terbuka di Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2020 teridentifikasi ada 20 titik yang merupakan tambang terbuka dan 2 titik teridentifikasi bukan lahan terbuka tetapi lahan rawa luas yang menjadi tempat wisata pemancingan. Dari 20 titik tambang terbuka ada 3 titik yang berada di lokasi tambang aktif. Titik lokasi berada di kawasan APL (Area Penggunaan Lain) ada 10 dan 12 titik lokasi yang berada di kawasan hutan produksi (HP). Dari 22 titik tersebut dapat direkomendasikan menjadi Perhutanan Sosial, Reklamasi, Pariwisata, Rekreasi Pendidikan, Rekreasi Pemancingan dan Pemanfaatan bekas lubang galian tambang sebagai embung sumber air tawar .

19. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Daerah

- a. Jumlah dana sebesar Rp. 75.000.000,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 68.549.000,- (91%).
- c. OutputKegiatan, 1 DokumenData Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kalsel
- d. Outcomes,dokumen/data status lingkungan hidup kalsel yang disusun 100%

IKPLH dan terealisasi dengan capaian kinerja 100 %. Penyusunan Dokumen IKPLH dilombakan ditingkat Nasional dengan Nama Nirwasitantra. Diinformasikan Dokumen IKPLH Tahun 2019,

Untuk dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLH) ditargetkan 1 Dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100 %. Dokumen IKPLH merupakan gambaran status lingkungan hidup suatu daerah sekaligus menggambarkan kinerja Gubernur Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyusunan Dokumen IKPLH dilombakan ditingkat Nasional dengan Nama Nirwasitantra. Pemerintah Provinsi Kal Sel mendapat Juara Harapan 1 dari 34 Provinsi Seluruh Indonesia . Sedang untuk Dokumen IKPLH tahun 2020 Pemerintah Kal Sel masuk jadi kandidat lagi dan telah dipresentasikan Plt. Gubernur melalui video , pemenangnya diumumkan pada tahun 2021.

Pelaksanaan Program Dan Kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan Tahun Anggaran 2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Jumlah dana sebesar Rp. 383.546.725,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 378.756.825,- (98%).
- c. Output, tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menyangkut ketersediaan perangkat, materai, benda pos;; jasa administrasi keuangan, peralatan dan bahan kebersihan kantor; Alat Tulis Kantor; barang cetakan dan penggandaan; komponen Listrik, Bahan bacaan surat kabar; logistik kantor, BBM, makanan dan minuman; pelaksanaan koordinasi ke luar dan dalam daerah.
- d. Outcomes, 100% Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- e. Program dan kegiatan terlaksana 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Jumlah dana sebesar Rp. 145.031.175,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 144.076.286,- (99%).

- c. Output, tersedianya, peralatan dan perlengkapan kantor dan pengadaan mebeluler terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, pemeliharaan kendaraan selama 1 tahun
- d. Outcomes, 100% Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
- e. Program dan kegiatan terlaksana 100%

3. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 31.551.000,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 31.551.000,- (100%) .
- c. Output, Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan / bintek serta penyediaan Pakaian Kerja Lapangan 16 stell
- d. Outcomes, persentase Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur 100%
- e. Program dan kegiatan terlaksana 100%

4. Standarisasi dan Sertifikasi Laboratorium Lingkungan

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 185.372.350,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 173.360.250,- (93%) .
- c. Output, Terlaksananya akreditasi laboratorium lingkungan
- d. Outcomes, IndikatorJumlah parameter terakreditasi ditargetkan 9 parameter dan realisasi 25 parameter sehingga capaian kinerja sebesar 277,78 %, indikator jumlah parameter teregistrasi ditargetkan 4 parameter dan realisasi nol karena pengajuan ini akan dilaksanakan pada tahun 2021setelah keluar bukti sertifikat akreditasi. Indikator pengendalian mutu laboratorium ditargetkan 100% dan realisasi 100 %

Pada tahun 2020 merupakan waktu pengajuan reakreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) karena pada tanggal 26 Desember 2020 adalah batas akhir masa berlakunya akreditasi UPT. Laboratorium Lingkungan, sehingga pengajuan untuk perpanjangan akreditasi dilaksanakan mulai bulan Maret 2020, pelaksanaan remote asesment pada bulan Juli 2020 hingga keluar hasil penetapan akreditasi oleh

Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 8 Desember 2020. Pada saat reakreditasi tersebut sekaligus pengajuan parameter pengujian.

Indikator Jumlah parameter terakreditasi laboratorium lingkungan ditargetkan 9 parameter, realisasi 25 parameter, sehingga capaian kinerja 277,78 %. Jumlah parameter teregistrasi ditargetkan 4 parameter, namun belum ada realisasi atau nol, karena pengajuan parameter teregistrasi dilaksanakan pada tahun 2021. Indikator pengendalian mutu laboratorium ditargetkan 100 %, realisasi 100 %, sehingga capaian kinerja 100 %.

5. Penyelenggaraan Pengujian dan Pengambilan Sampel Laboratorium Lingkungan

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 504.609.950,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 504.439.631,- (99%) .
- c. Output, Terselenggaranya Pengujian dan Pengambilan Sampel Laboratorium Lingkungan selama 12 bulan
- d. Outcomes, jumlah sampel pelanggan yang dapat diambil/diuji ditargetkan 650 sampel dan terealisasi sebanyak 1092 sampel, sehingga capaian kinerja sebesar 168%. Indikator kedua yaitu jumlah parameter yang dapat diuji ditargetkan 40 parameter dan terealisasi 55 parameter sehingga capaian kinerja sebesar 137,5%.

Jumlah parameter yang dapat diuji mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena semua bahan kimia, bahan habis pakai dan peralatan yang diperlukan sesuai keperluan parameter yang direncanakan dapat diadakan dengan anggaran yang tersedia, walaupun terjadi pemotongan anggaran akibat adanya pandemi Covid-19. Namun perlu menjadi catatan bahwa pemotongan anggaran berakibat pada tidak terealisasinya pembelian bahan habis pakai /suku cadang beberapa peralatan laboratorium yang semestinya sudah harus diganti dan pelaksanaan perawatan rutin eksternal peralatan laboratorium harus ditunda ke tahun 2021. Untuk itu, pembelian bahan habis pakai peralatan dan perawatan rutin eksternal peralatan harus menjadi prioritas di tahun 2021 untuk memastikan peralatan tersebut tetap dapat berfungsi baik dalam melakukan pengujian parameternya.

6. Pengadaan Alat – alat Laboratorium Lingkungan

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 1.106.698.000,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 1.106.652.258,- (100%) .
- c. Output, Indikator pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 9 unit peralatan laboratorium
- d. Outcomes, pengadaan peralatan laboratorium lingkungan sebanyak 9 unit terdiri dari 1 alat laboratorium air dan 8 alat laboratorium udara.
- e. Program dan kegiatan terlaksana 100%

Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan pada tahun 2020 dapat terlaksana sesuai dengan target. Pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai dengan waktu pelaksanaan, barang diterima dalam keadaan lengkap dan baik, uji fungsi alat dan pelatihan penggunaan alat terlaksana dengan baik. Pengadaan peralatan laboratorium air berupa COD reaktor sebagai peralatan tambahan mengingat jumlah pengujian parameter COD yang bertambah cukup banyak. Pengadaan peralatan laboratorium udara berupa peralatan pengambilan sampel udara ambien (HVAS, sound level meter, gas air sampler, weather station) merupakan peralatan pengambilan sampel udara ambien tambahan sehingga pengambilan sampel udara ambien bisa dilakukan secara simultan pada 2 titik, hal ini akan menghemat waktu dan sumber daya untuk pengambilan sampel udara ambien.

Pengadaan peralatan laboratorium udara berupa CO Analyzer menambah parameter udara ambien yang dapat diuji berupa parameter CO, sehingga pengujian parameter gas udara ambien yang rutin diuji oleh pelanggan bisa terakomodir di UPTD Laboratorium Lingkungan Prov. Kalsel (sebelumnya pengujian parameter CO disubkontrakkan ke BTKLPP). Pengadaan peralatan laboratorium udara berupa kalibrator HVAS dan kalibrator flowrate impinger akan memudahkan dalam kalibrasi peralatan pengambilan sampel udara ambien. Pengadaan peralatan laboratorium udara berupa alat emisi menambah parameter yang dapat diuji berupa parameter gas emisi. Keseluruhan pengadaan peralatan ini mendukung peningkatan jumlah sampel pelanggan yang dapat diambil/diuji dan mendukung peningkatan jumlah parameter yang dapat diuji.

UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 1.468.947.875,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 1.369.381.337,- (93 %)
- c. Output, tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menyangkut ketersediaan perangkano, materai, benda pos; jasa komunikasi air, listrik; jasa administrasi keuangan, peralatan dan bahan kebersihan kantor; Alat Tulis Kantor; barang cetakan dan penggandaan; komponen Listrik, air, dan telepon; Bahan bacaan surat kabar; logistik kantor, BBM,; makanan dan minuman; pelaksanaan koordinasi ke luar dan dalam daerah.
- d. Outcomes, Pemenuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran 100%
- e. Program dan kegiatan terlaksana 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 1.248.987.050,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 957.424.332,- (76%) .
- c. Output, Penyediaan Kendaraan Dinas/ Operasional, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 18 jenis, pemeliharaan kendaraan Dinas / Operasional. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara ditargetkan 9 Unit dan terealisasi 9 Unit atau sebesar 100%.
- d. Outcomes, Pemenuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran 100%
- e. Program dan kegiatan terlaksana 100%

3. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 43.450.000,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 42.800.000,- (98%) .
- c. Output, Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan / bintek serta penyediaan Pakaian Kerja Lapangan 10 stell
- d. Outcomes, persentase Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur 100%
- e. Program dan kegiatan terlaksana 100%

4. Operasional Pemeliharaan dan Perawatan di TPA Sampah

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 536.000.000,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 534.997.250,- (99%) .
- c. Output, Pelaksanaan kegiatan operasional TPA Regional Banjarbakula
- d. Outcomes, persentase pelaksanaan kegiatan operasional TPA Sampah Regional Banjarbakula terkait dengan pelaksanaan operasional tersebut ditarget 100%, akan tetapi terjadi kendala terkait pemenuhan sampah residu, sehingga hanya terealisasi sebesar 84,15%. Hal ini dikarenakan tidak dapat terpenuhinya oleh pihak 5 (lima) Kab/Kota yang mengakibatkan pemasukan sampah ke TPA pun berkurang dan terbatas.

5. Operasional di TPA Sampah

- a. Jumlah pagu sebesar Rp. 2.926.982.575,-
- b. Realisasi Keuangan Rp. 2.711.384.248,- (92%) .
- c. Output, pelaksanaan Pengelolaan Sampah di lima Kab./Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Outcomes, Persentase pelaksanaan kegiatan operasional TPA Regional Banjarbakula pada tahun 2020 realisasi yang tercapai hanya 84,15% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 100%.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatanyang dilaksanakan melalui Dana Dekonsentrasi adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.287.500.000,- Realisasi belanja sebesar Rp.269.853.300,- (93.86%). Sisa dana sebesar Rp.17.646.700,- (6.13%).

Tabel 7.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020 Dinas LH

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
URUSAN WAJIB YANG DI LAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)																
Urusan yang dapat dilaksanakan setiap SKPD																
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran dan kepegawaian Dinas LH	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Dokumentasi Surat Menyurat	6	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	2	laporan	6	laporan	100%
		Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
		Jumlah cetakan dan atau penggandaan	15000	eksemplar	5000	eksemplar	5000	eksemplar	5000	eksemplar	100%	5000	eksemplar	15000	eksemplar	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan kebersihan kantor	18	jenis	6	jenis	6	jenis	6	jenis	100%	6	jenis	18	jenis	100%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
		Pelaksanaan koordinasi/rapat/koordinasi ke dalam daerah	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Jumlah Laporan penyediaan honorarium pengelola keuangan	36	berkas	12	berkas	12	berkas	12	berkas	100%	12	berkas	36	berkas	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang akan diadakan	23	Jenis	7	Jenis	8	Jenis	8	Jenis	100%	8	Jenis	23	Jenis	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	100%	4	Jenis	12	Jenis	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian BBM	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas LH	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jenis Alat Angkutan Darat bermotor	2	buah	1	buah								1		50%
	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	21	jenis	5	jenis	20	jenis	20	jenis	100%	20	jenis	45	jenis	214%
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor terpelihara	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan minibus yang terurus administrasinya	66	unit	20	unit	23	unit	23	unit	100%	23	unit	66	unit	100%
	Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Jenis/ unit peralatan gedung kantor yang dilakukan perbaikan	15	jenis	5	jenis	5	jenis	5	jenis	100%	5	jenis	15	jenis	100%
3	PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP Dinas LH	243		80		80,1		81		101%	80,1		241,1		99%
		Persentase asset yang tercatat	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%
	Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dan Aset SKPD	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	12	Laporan	100%
		Jumlah laporan aset yang dibuat	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%
	Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021(tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP	79		28		27		27		100%	27		82		104%
		Nilai komponen Pelaporan pada SAKIP Dinas LH	42		13,8		14		14		100%	14		41,8		100%
		Jumlah dokumen pelaporan yang disusun sesuai ketentuan	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%
4	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah Di Kalsel	292	%	75	%	97	%	81	%	84%	97	%	253	%	87%
	4788	Persentase peningkatan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	44,5	%	12,32	%	14,62	%	0	%	0%	14,62	%	26,94	%	61%
	Peningkatan Kota Sehat/ Adipura dan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kab/Kota yang mendapat penghargaan sebagai kota bersih	24	Kab/Kota	8	Kab/Kota	8	Kab/Kota	0	Kab/Kota	0%	8	Kab/Kota	16	Kab/Kota	67%
		Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	66	%	20	%	22	%	35,66	%	162%	22	%	77,66	%	118%
		target penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	226	%	77	%	75	%	58	%	77%	75	%	210	%	93%
	Pembebasan Lahan dan Pengelolaan TPA Regional	Jumlah Persil Lahan yang dibebaskan	44	Persil	19	Persil	0	Persil	0	Persil	0%	0	Persil	19	Persil	43%
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di Bidang lingkungan	peningkatan Jumlah sekolah adiwiyata	220	sekolah	80	sekolah	30	sekolah	27	sekolah	90%	30	sekolah	137	sekolah	62%
5	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase parameter kualitas air sungai hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	201,5	%	66,5	%	67	%	64,59	%	96%	67	%	198,09	%	98%
		Persentase parameter kualitas udara hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	275	%	90	%	90	%	90	%	100%	90	%	270	%	98%
		Persentase penurunan emisi GRK dari Business As Usual	39,71	%	11	%	13,11	%	13,11	%	100%	13,11	%	37,22	%	94%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Persentase ketaatan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan	225	%	70	%	100	%	100	%	100%	100	%	270	%	120%
		Persentase perusahaan yang menerapkan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	288,5	%	95	%	100	%	100	%	100%	100	%	295	%	102%
		Persentase dokumen KRP yang mendapat rekomendasi lingkungan	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%
	Penanganan Kasus dan Penegakan Hukum LH	Penyelesaian kasus hukum LH	300	%	100	%	100	%	98	%	98%	100	%	298	%	99%
		persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	300	%	100	%	100	%	98	%	98%	100	%	298	%	99%
	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah sungai Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yang dipantau kualitasnya	366	13 sungai (126 sampel)	84	13 sungai (114 sampel)	82	13 sungai (82 sampel)	82	13 sungai (82 sampel)	100%	82	13 sungai (82 sampel)	248	13 sungai (82 sampel)	68%
		Jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udaranya	39	kab/kota	13	kab/kota	13	kab/kota	13	kab/kota	100%	13	kab/kota	39	kab/kota	100%
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	perusahaan yang memenuhi ketentuan dalam pengelolaan kualitas lingkungan	133	Perusahaan	32	Perusahaan	20	Perusahaan	22	Perusahaan	110%	20	Perusahaan	74	Perusahaan	56%
	Pengelolaan Prokasih/ Superkasih	Jumlah Lokasi yang dilakukan perhitungan Nilai Konsentrasi parameter pencemar domestik	9	Kab/Kota	3	Kab/Kota			0					3	Kab/Kota	33%
	Pengkajian , Evaluasi dan Pembinaan Teknis AMDAL	Persentase dokumen Lingkungan yangmendapatkan rekomendasi Kelayakan dan/ atau ketidaklayakan lingkungan	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%
		Jumlah lisensi KPA Kab/Kota dari provinsi	14	Lisensi	6	Lisensi	3	Lisensi	3	Lisensi	100%	3	Lisensi	12	Lisensi	86%
	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Persentase perusahaan dengan peringkat kinerja biru dan/atau hijau	265	% dari 26 perusahaan	87	%dari 26 Perusahaan	87	%dari 15 Perusahaan	0	%dari 15 Perusahaan	0%	87	%dari 15 Perusahaan	174	%dari 15 Perusahaan	66%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
	Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	jumlah perusahaan/RS/Instansi yang diawasi terkait pengelolaan Limbah B3	86	Perusahaan/RS	21	Perusahaan/RS	36	Perusahaan/RS	37	Perusahaan/RS	103%	36	Perusahaan/RS	94	Perusahaan/RS	109%
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang terdaftar di Aplikasi SRN-PPI LHK	39	Lokasi	13	Lokasi	26	Lokasi	55	Lokasi	212%	26	Lokasi	94	Lokasi	241%
		Persentase Emisi GRK yang dihitung	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%
		jumlah usaha/kegiatan yang dapat di inventarisir mengenai penggunaan bahan perusak ozon	45	usaha/keg	15	usaha/keg								15		33%
	Peningkatan Kapasitas SDM dan Peraturan LH	Jumlah ASN Yang mengikuti pendidikan Pelatihan dan bimbingan teknis bersertifikat Kompetensi	52	Orang	15	Orang	10	Orang	2	Orang	20%	10	Orang	27	Orang	52%
		Jumlah MHA yang ditetapkan	12	Kelompok	0	Kelompok	6	Kelompok	10	Kelompok	167%	6	Kelompok	16	Kelompok	133%
		Pembuatan Raperda Pengelolaan Air	2		1	Raperda			0					1		50%
6	PERLINDUNGAN, REHABILITASI, PEMULIHAN DAN KONSERVASI CADANGAN SDA DAN LH	Persentase Laporan Mengenai Kualitas Lingkungan yang disusun dan di informasikan	300	%	100	%	100	%	0	Ha	0%	100	%	200	%	67%
		Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang dihasilkan	4	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	100%
		Jumlah Kemitraan dengan Forum Komunitas Masyarakat Peduli LH	16	Kemitraan	3	Kemitraan	3	Kemitraan	3	Kemitraan	100%	3	Kemitraan	9	Kemitraan	56%
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Pohon yang ditanam	2716	Pohon	1000	Pohon								1000		37%
		Jumlah Peserta Saka Kalpataru, Kalpataru dan Duta LH	795	orang	260	orang	50	orang	50	orang	100%	50	orang	360	orang	45%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021(tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran LH	450	orang	100	orang								100		22%
	Implementasi Kebijakan KLHS	Persentase validasi KLHS kab/kota yang dapat divalidasi	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%
	Implementasi Kebijakan RPPLH	Persentase KHG yang terencana	100	%	100	%								100		100%
		Jumlah dokumen perencanaan PPLH yang dihasilkan	1	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	200%
		Persentase kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang dipetakan	150	%	50		75	%	75	%	100%	75	%	200	%	133%
	Pengembangan data dan informasi lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen IKPLHD yang disusun	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
	Pengelolaan Lahan Gambut dan Akses Terbuka	Luas lahan gambut rusak yang diinventarisir	28415	Ha	10000	Ha	2000	Ha	2000	Ha	100%	2000	Ha	14000	Ha	49%
		Jumlah Lokasi Lahan Akses Terbuka yang diinventarisir	5	Lokasi	2	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	100%	1	Lokasi	4	Lokasi	80%

Tabel 8. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020 UPT Laboratorium Lingkungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021(tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
URUSAN WAJIB YANG DI LAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)																	
	Program Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	300	%	0	%	10	%	100	%	100	%	200	%	200	50	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	36	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	33	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	36	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	33	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	33	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	48	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	24	Bulan	24	50	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	36	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	33	
	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan	36	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	33	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan	36	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	33	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	36	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	33	
	Pelayanan Administrasi dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Penyediaan Kelengkapan administrasi dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	12	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan			12	Bulan	12	100	
	Pengadaan Kendaraan Pengambil Sampel Laboratorium	Pengadaan Kendaraan Operasional Lab (Pengambil sampel Lab)	3	Unit	0	Unit	3	Unit	3	Unit			3	Unit	3	100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021(tahun n-1)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Peningkatan Kapasitas dan SDM Laboratorium	Meningkatkan kapasitas SDM Laboratorium Lingkungan : 1. In House Training, 2. Uji Profisiensi, 3. Monev	3	Kegiatan	0	Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan			3	Kegiatan	3	100	
	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1. Pengadaan peralatan Laboratorium, 2. Pengadaan bahan kimia dan alat gelas, 3. perawatan dan kalibrasi alat	3	Paket	0	Paket	3	Paket	3	Paket			3	Paket	3	100	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	300	%	0	%	0	%	0	%	100	%	100	%	100	33	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	36	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	33	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	45	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	25	Buah	25	Buah	25	56	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laboratorium	36	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	33	
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur	300	%	0	%	0	%	0	%	100	%	100	%	100	33	
	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	300	%	0	%	0	%	0	%	100	%	100	Bulan	100	33	
	Pengadaan Pakaian Kerja dan Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	36	Stel	0	Stel	0	Stel	0	Stel	16	Stel	16	Unit	16	44	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Parameter Yang Dapat diuji	78	Parameter	0	Parameter	0	Parameter	0	Parameter		Parameter	0	Parameter	0	0%	
		Jumlah Parameter yang terakreditasi	41	Parameter	0	Parameter	0	Parameter	0	Parameter		Parameter	0	Parameter	0	0%	
		Persentase Kepuasan Pelanggan	246	%	0	%	0	%	0	%		%	0	%	0	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021(tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Standarisasi dan Sertifikasi Laboratorium Lingkungan	Terlaksananya Akreditasi Laboratorium Lingkungan	3	Sertifikat	0	Sertifikat	0	Sertifikat	0	Sertifikat	1	Sertifikat	1	Sertifikat	1	33
	Penyelenggaraan Pengujian dan Pengambilan Sampel Laboratorium Lingkungan	Terselenggaranya Pengujian dan Pengambilan Sampel Laboratorium Lingkungan	36	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	33
	Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Bahan dan Peralatan Laboratorium Lingkungan	16	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	3	Unit	3	Unit	3	19
	Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air (DAK Penugasan)	Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan Uji Kualitas Air	9	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	9	Buah	9	Buah	9	100

Tabel 9 . Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020 UPT TPAS Regional Banjarbakula

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	URUSAN WAJIB YANG DI LAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)															
	Urusan yang dapat dilaksanakan setiap SKPD															
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran dan kepegawaian UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan di TPAS Regional Banjarbakula	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jasa Kebersihan Kantor di TPAS Regional Banjarbakula	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Pemenuhan Pengurus Administrasi Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah Pada TPAS Regional Banjarbakula	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di TPAS Regional Banjarbakula	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan di TPAS Regional Banjarbakula	36	Bulan	12	berkas	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di TPAS Regional Banjarbakula	36	Bulan	12	Jenis	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di TPAS Regional Banjarbakula	36	Bulan	12	Jenis	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian BBM di TPAS Regional Banjarbakula	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Pemenuhan Saranan dan Prasana Makan dan Minum yang dibutuhkan Pegawai maupun tamu di TPAS Regional Banjarbakula	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	100%
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jenis Alat Angkutan Darat bermotor	18	Unit	8	Unit	5	Unit	1	Unit	20%	5	Unit	14	Unit	78%
	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	38	jenis	16	jenis	18	jenis	9	jenis	50%	9	jenis	34	jenis	89%
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan minibus yang terurus administrasinya	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	unit	100%
	Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Jenis/ unit peralatan gedung kantor yang dilakukan perbaikan	36	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	jenis	100%
3	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS APARATUR	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	300	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	%	100%
	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikat kompetensi	100	Orang	10	Orang	15	Orang	0	Orang	0%	15	Orang	25	Orang	25%
	Pengadaan Pakaian Kerja dan Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan dan Harian dapatdigunakan	130	Stell	10	Stell	37	Stell	37	Stell	100%	47	Stell	94	Stell	72%
4	PENGELOLAAN TPA BANJARBAKULA	Jumlah Tonase Pemrosesan Sampah di TPA Sampah Regional Banjarbakula dari 5 Kab/Kota	45.000	ton	45.000	ton	0	ton	0	ton	0%	97	%	45.097	ton	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (berjalan)		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021(tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Operasional Pemeliharaan dan Perawatan di TPA Sampah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Operasional TPA Regional Banjarkakula	100	%	60	%	0	%	0	%	0%	0	%	60	%	60%
5	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Tonase Pemrosesan Sampah di TPA Sampah Regional Banjarkakula dari 5 Kab/Kota	172.000	ton	0	ton	99.000	ton	100	%	100%	100	%	200	%	0%
	Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas dan Sarana Prasarana di TPA Sampah	Jumlah Kab/Kota yang mendapat penghargaan sebagai kota bersih	200	%	0	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	100%
	Operasional di TPA Sampah	Jumlah Persil Lahan yang dibebaskan	200	%	0	%	100	%	100	%	100%	100	%	200	%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2020, secara keseluruhan pencapaian kinerja berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 107.76% dengan realisasi anggaran sebesar 94.17%

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10. Realisasi Kinerja sesuai Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,5	68,43	107.76%

Persentase capaian kinerja utama tersebut dapat dikatakan termasuk sangat memuaskan (capaian di atas 90%). Nilai indeks kualitas lingkungan hidup ini merupakan resultan dari upaya menjaga laju deforestasi, pengelolaan sampah dan limbah, upaya rehabilitasi dan pengendalian pencemaran dalam bentuk partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Semakin tinggi angka indeks lingkungan hidup, maka dapat dikatakan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik.

Adapun untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n - 2)	Tahun 2021 (n - 1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n + 1)	Tahun 2020 (n - 2)	Tahun 2021 (n - 1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indikator Kinerja Kunci											
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			63.5	64	68	69	68.43	0	68	69	
2.	Indikator Kinerja PD											
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			63.5	64	68	69	68.43	0	68	69	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas LH Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Selatan bahkan di dunia. Kedudukan yang strategis disebabkan antara lain, adanya eksploitasi hasil tambang dan hutan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sehingga akan membahayakan bagi masyarakat yang ada di Kalsel pada khususnya.

Mengingat dampak lingkungan hidup ada yang tidak dapat dirasakan dalam waktu segera (hanya jangka panjang), maka penanganan/pembinaan terhadap pengusaha/masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan hidup mutlak dilakukan agar dalam jangka panjang tidak menimbulkan penderitaan bagi anak cucu kita. Dinas LH Provinsi Kalsel juga berperan dalam isu lingkungan internasional, dimana iklim pemanasan global sudah sangat terasa, sebagai contoh semakin tidak jelasnya batas antara musim hujan dan musim panas. adapun Isu strategis sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

- **Rendahnya Indeks Kualitas Air**

- 1 Aktivitas pertambangan. Pengelolaan lingkungan yang tidak serius dari pelaku usaha aktivitas pertambangan akan menyebabkan penurunan kualitas air, khususnya pada parameter pH, Fe, Mn, Cd, dan TSS.
- 2 Kegiatan perkebunan dan kehutanan (HTI) pada tahap awal melakukan pembersihan lahan (land clearing) yang menghilangkan tanaman-tanaman penutup menjadi lahan terbuka. Lahan terbuka akan menyebabkan tanah menjadi lebih peka terhadap erosi dan akan menyebabkan penurunan kualitas air, khususnya pada parameter NO₃, PO₄, TSS dan kekeruhan.
- 3 Kegiatan industri dapat menjadi pemicu dalam penurunan kualitas air, dimana limbah cair yang dihasilkan jika tidak memenuhi baku mutu sampai ke sungai maka akan memberikan bahan-bahan pencemar, terutama logam-logam berat, yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Parameter yang berhubungan dengan kegiatan industri dapat berupa pH, BOD, COD, DO, minyak-lemak, dan logam-logam berat.
- 4 Tingkat kesadaran masyarakat di Kalimantan Selatan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga (domestik) dan kegiatan MCK yang masih di sungai akan menyebabkan penurunan kualitas air, khususnya pada parameter detergen dan E. coli.
- 5 Status Mutu Air (metode IP) antara 2,63 – 10,26
- 6 Hampir semua sungai-sungai di Kalsel dinyatakan status cemar ringan hingga cemar berat berdasarkan Baku Mutu Kelas I Pergub Kalsel No 05 tahun 2007 (sesuai Nilai Indeks Pencemar).

- **Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan**

- 1 Banyaknya lubang tambang yang belum direvegetasi
- 2 Masih luasnya lahan kritis di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data hasil overlay Peta Lahan Kritis BPDAS dan Bappeda Prov.Kalsel (Perda No 9 Tahun 2015 RTRWP 2015-2035 dan RBI (BIG Tahun 2017), menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 10,29% termasuk dalam kategori kritis dan 3,60% dalam kategori sangat kritis
- 3 Lahan akses terbuka yang belum ditangani.

- **Kerusakan Ekosistem Gambut**

1 Perubahan tata guna lahan gambut dalam rangka persiapan lahan pertanian, perkebunan, pemukiman dan lain-lain

2 Prosentase kerusakan gambut Tahun 2019 mencapai 9,96% Kebakaran Hutan dan Lahan

3 Faktor ekonomi masyarakat lokal juga menjadi salah satu penyebab mengapa kebakaran hutan selalu terjadi setiap tahun. Sebagian masyarakat ada yang membuka lahan dan hutan dengan membakar karena memerlukan biaya sedikit dan instan untuk membuka lahan.

- **Perlunya Peningkatan Kualitas Air Laut**

1 Kerusakan daerah pesisir

2 Kondisi terumbu karang pada 2019: sangat baik (17,51%), baik (31,19%), sedang (22,57%), dan rusak (28,73%);

3 Tingkat kerusakan padang lamun rata-rata 22,5%;

4 Kasus di Muara Sungai Barito: parameter kecerahan, kekeruhan, sampah, dan TSS melebihi baku mutu menurut Pergub Kalimantan Selatan No. 043 tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Laut.

5 Pengelolaan perikanan, perkebunan dan pertanian, serta aktivitas industri yang tidak berwawasan lingkungan

6 Konversi lahan mangrove untuk lahan tambak, pelabuhan dan pertanian

7 Banyaknya lokasi terminal khusus maupun TUKs di wilayah Kalimantan Selatan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan pesisir, hal ini disebabkan karena sebagian terminal khusus tersebut dibangun pada daerah mangrove atau kawasan terumbu karang.

9 Buangan minyak kotor dari *tugboat*, kapal reguler, kapal ikan, nelayan, dsb.

- **Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan Dan Limbah B3**

1 Upaya pengurangan sampah masih belum optimal

2 Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan produksi sampah

3 Kurangnya sarana prasarana dalam pembuangan sampah sementara Circular economy dari aktivitas persampahan masih belum banyak diimplementasikan

4 Penggunaan bahan yang dapat dipakai berulang masih belum menjadi gaya hidup

5 Jumlah bank sampah yang masih tidak sebanding dengan produksi sampah

6 Upaya penanganan persampahan masih belum optimal

7 Beberapa Kabupaten/Kota dinilai tidak layak dibangun TPA, karena seluruh wilayahnya berada di lahan basah (Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara).

8 Jumlah penduduk yang meningkat akan juga meningkatkan jumlah sampah domestik. Timbulan sampah padat domestik mencapai 766.902 m³/tahun.

9 Sistem punishment terhadap pembuangan sampah sembarangan belum berjalan

10 Pengelolaan limbah B3 medis belum optimal

11

Jumlah timbulan limbah B3 dengan karakteristik medis di Kalsel Tahun 2019 berjumlah 323,983 Ton dari RSUD di 9 kab/kota tidak termasuk klinik-klinik yang tersebar di Kalsel.

Kalsel belum memiliki unit incinerator yang dikelola Pemprov Kalsel dengan kapasitas memadai, sehingga pengelolaan harus dilakukan di luar wilayah

- Kalsel dan juga dengan konsekuensi membengkaknya biaya transporter

1 **Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Belum Optimal**

2 Kajian mengenai keanekaragaman hayati belum dikembangkan
Belum memiliki taman KEHATI

- **Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**

1 Bertambahnya Industri

2 Pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi semakin meningkat.

3 Peningkatan produk sehingga emisi bertambah.

4 Pembangunan rendah karbon belum diimplementasikan dengan baik

5 Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor

6 Kurangnya kemampuan mengendalikan frekuensi jejak karbon dalam
7 penggunaankendaraan bermotor

8 Kemampuan mengurangi emisi CO

9 Revegetasi belum memadai

10 Kemampuan Pengurangan bahan penghasil CO masih rendah

11 Kemampuan mengurangi emisi gas metan

12 Pengelolaan limbah ternak

13 pengelolaan persampahan dan limbah masih belum optimal

14 Aktivitas pertanian

15 Efisiensi energi masih rendah

16 Upaya penghematan energi belum dilakukan secara masif

Berkaitan dengan hal tersebut, Kalimantan Selatan harus bertekad untuk memproyeksikan daerahnya, menjadi daerah yang mampu mengelola SDA dan lingkungan secara efisien, mandiri dan ramah lingkungan. Terwujudnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan setelah merasakan sendiri susahnya hidup dalam kondisi lingkungan hidup yang rusak, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya diarahkan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, generasi sekarang dan selanjutnya.

Formulasi isu-isu penting ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dalam hal yang berkaitan dengan tupoksi, DLH Provinsi Kalsel harus tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadididalam perkembangan dan keinginan masyarakat. Untuk peningkatan SDM Aparatur dilakukan dengan mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan serta rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. Selain itu dilakukan pula peningkatan Sarana dan Prasarana dengan mengembangkan perangkat dalam mendukung manajemen pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih baik dalam menunjang pembangunan serta

menyusun daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12. Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2022 Dinas LH Prov. Kalsel

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
2	11																	36,586,156,436
2	11	01																36,572,781,436
2	11	01																18,554,850,061
2	11	01	1.01															18,541,475,061
2	11	01	1.01															399,253,500
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP	Semua Kab/Kota	29.5 Poin 100 %		339,253,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							339,253,500
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai komponen Pelaporan pada SAKIP	Kota Banjarbaru	14.2 Poin		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							60,000,000
2	11	01	1.02															12,801,943,723
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjarbaru	14 Bulan		12,366,943,723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							12,366,943,723
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Banjarbaru	12 Bulan		360,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							360,000,000
2	11	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan kinerja keuangan dan aset yang disusun	Kota Banjarbaru	5 Laporan		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							75,000,000
2	11	01	1.05															143,202,500
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian kerja	Kota Banjarbaru	115 stell		42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							42,000,000
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/bimtek yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Semua Kab/Kota	10 orang		101,202,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							101,202,500
2	11	01	1.06															1,585,432,250
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kota Banjarbaru	12 Bulan		31,245,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							31,245,500
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan Laporan Dokumentasi Surat Menyurat umlah Pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	Semua Kab/Kota	12 Bulan 12 Bulan		64,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							64,850,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan Pengisian Bahan Bakar Minyak		Kota Banjarbaru		12 Bulan		295,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			295,000,000	
2	11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kota Banjarbaru		12 Bulan		19,435,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,435,500	
2	11 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Banjarbaru		12 Bulan		142,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			142,125,000	
2	11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke dalam daerah Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah		Semua Kab/Kota		12 Bulan 12 Bulan		1,032,776,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,032,776,250	
2	11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,080,200,000				1,080,200,000	
2	11 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kota Banjarbaru		1 Unit		430,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			430,200,000	
2	11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan Jumlah jenis Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pengadaan		Kota Banjarbaru		4 Jenis 4 Jenis		650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			650,000,000	
2	11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,146,296,838				1,146,296,838	
2	11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Ketersediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Banjarbaru		12 Bulan		419,999,338	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			419,999,338	
2	11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD Jumlah pemenuhan pelayanan kebersihan dan keamanan Kantor		Kota Banjarbaru		12 Bulan 12 Bulan		726,297,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			726,297,500	
2	11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,398,521,250				1,385,146,250	
2	11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan kendaraan dinas/operasional roda 2,3,4 dan minibus yang terurus administrasinya		Kota Banjarbaru		12 Bulan		432,587,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			432,587,500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kota Banjarbaru		12 Bulan		890,933,750				890,933,750	
2 11 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kota Banjarbaru		12 Bulan 12 Bulan		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61,625,000	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								672,134,500				672,134,500	
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi								371,626,125				371,626,125	
2 11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		Jumlah dokumen PPLH yang diselesaikan Jumlah Pemetaan Jasa Lingkungan Persentase Dokumen PPLH Kab/Kota yang diverifikasi		Semua Kab/Kota		1 Dokumen 2 Sektor 100 %		371,626,125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			371,626,125	
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi								300,508,375				300,508,375	
2 11 02 1.02 04	Pembuatan dan Pelaksanaan KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup		Persentase dokumen lingkungan yang diproses sesuai ketentuan Persentase KLHS Kab/Kota yang di verifikasi		Semua Kab/Kota		100 % 100 %		300,508,375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,508,375	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								5,221,171,875				5,221,171,875	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								1,451,050,875				1,451,050,875	
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udaranya (39 sampel) Jumlah sungai yang dipantau kualitasnya (76 sampel) Rata-Rata tahunan materi partikulat halus PM10		Semua Kab/Kota		13 Kab/Kota 13 Kab/Kota 10.4 µg/m3		1,157,771,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,157,771,000	
2 11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Emisi GRK per tahun Persentase emisi GRK yang dihitung		Semua Kab/Kota		0 100 %		293,279,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			293,279,875	
2 11 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								850,000,000				850,000,000	
2 11 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun		Semua Kab/Kota		1 Dokumen		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	
2 11 03 1.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diisolasi		Semua Kab/Kota		1 Kegiatan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 03 1.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		PJumlah Sumber Pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dihentikan		Semua Kab/Kota		1 Kegiatan		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
2 11 03 1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								2,920,121,000				2,920,121,000	
2 11 03 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Jumlah Lokasi yang dilakukan pemulihan		Semua Kab/Kota		1 Sungai		2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,500,000,000	
2 11 03 1.03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		Luas Lahan Akses Terbuka yang diinventarisir Luas lahan gambut rusak yang direstorasi		Semua Kab/Kota		5000 Ha 2000 Ha		420,121,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			420,121,000	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								1,500,000,000				1,500,000,000	
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi								1,500,000,000				1,500,000,000	
2 11 04 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Dokumen Kajian Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati		Semua Kab/Kota		1 Dokumen		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
2 11 04 1.01 03	Pengelolaan Kebun Raya		Jumlah Kebun Raya yang dikelola		Semua Kab/Kota		1 Lokasi		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
2 11 04 1.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola		Semua Kab/Kota		1 Lokasi		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								1,300,000,000				1,300,000,000	
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								1,300,000,000				1,300,000,000	
2 11 05 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah LB3 Yang dikelola Persentase pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3		Semua Kab/Kota		0.201 Juta Ton/Tahun 100 %		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300,000,000	
2 11 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah incinerator limbah medis yang dapat beroperasi		Semua Kab/Kota		1 Unit		1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								750,000,000				750,000,000	
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								750,000,000				750,000,000	
2 11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Perusahaan yang diawasi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup		Semua Kab/Kota		100 %		750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750,000,000	
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								350,000,000				350,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	07	1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					350,000,000				350,000,000	
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan kearifan lokal terkait PPLH Persentase peserta sosialisasi/bimtek/ seminar yang memahami tentang PPLH	Semua Kab/Kota			6 Balai Adat 100 %	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350,000,000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					4,000,000,000			4,000,000,000	
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi					4,000,000,000			4,000,000,000	
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Institusi/dunia usaha/komunitas yang terlibat dalam pelestarian fungsi LH Jumlah Kab/Kota yang meraih penghargaan sebagai kota bersih Jumlah Kampung Iklim yang mendapatkan apresiasi dari KLHK Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/Komunitas masyarakat Peduli dan Berbudaya LH	Semua Kab/Kota			75 Mitra 8 Kab/Kota 26 Lokasi 32 Sekolah	4,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,000,000,000
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					750,000,000			750,000,000	
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi					750,000,000			750,000,000	
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan dengan peringkat kinerja biru dan/atau hijau	Semua Kab/Kota			26 Perusahaan	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750,000,000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					450,000,000			450,000,000	
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi					450,000,000			450,000,000	
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH	Semua Kab/Kota			100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200,000,000
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang	Semua Kab/Kota			100 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								3,038,000,000			
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								3,038,000,000			
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Timbulan sampah yang didaur ulang Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga		Semua Kab/Kota		0 0 74 % 24 %		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Persil Lahan yang dibebaskan		Kota Banjarbaru		5 Persil		2,188,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,188,000,000
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus		Semua Kab/Kota		1 Kegiatan		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000
TOTAL											36,586,156,436			36,572,781,436		

Tabel 13.Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2022 UPTD Laboratorium Lingkungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										2,347,905,850	2,347,905,850		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										1,698,518,150	1,698,518,150	
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										122,400,000	122,400,000
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Banjarbaru		12 bulan		122,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		122,400,000	
2	11	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										123,306,400	123,306,400
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian kerja	Kota Banjarbaru		20 stell		6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,000,000	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/bimtek yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Kota Banjarbaru		15 orang		117,306,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		117,306,400	
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										238,338,900	238,338,900
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kota Banjarbaru		12 bulan		2,592,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,592,000	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan Laporan Dokumentasi Surat Menyurat Jumlah Pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	Kota Banjarbaru		12 bulan 12 bulan		35,804,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35,804,400	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan Pengisian Bahan Bakar Minyak	Kota Banjarbaru		12 bulan		30,832,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30,832,700	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Banjarbaru		12 bulan		17,347,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17,347,800	
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banjarbaru		12 bulan		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,000,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke dalam daerah Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah	Semua Kab/Kota		12 bulan 12 bulan		148,762,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		148,762,000	
2	11	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										562,328,850	562,328,850
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru		16 buah		23,066,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23,066,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan		Kota Banjarbaru		5 buah		506,628,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			506,628,000	
2 11 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Kota Banjarbaru		10 buah		32,634,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,634,850	
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								442,814,000				442,814,000	
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pemenuhan Jasa Surat Menyurat		Kota Banjarbaru		12 bulan		997,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			997,000	
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD Jumlah Parameter Terakreditasi Jumlah pemenuhan pelayanan kebersihan dan keamanan Kantor		Kota Banjarbaru		12 bulan 25 parameter 12 bulan		441,817,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			441,817,000	
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								209,330,000				209,330,000	
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pemenuhan kendaraan dinas/operasional roda 2,3,4 dan minibus yang terurus administrasinya		Kota Banjarbaru		12 bulan		74,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74,680,000	
2 11 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Semua Kab/Kota		12 bulan 12 bulan		134,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			134,650,000	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								649,387,700				649,387,700	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								649,387,700				649,387,700	
2 11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Jumlah Sampel Pelanggan yang dapat diambil/diuji		Kota Banjarbaru		650 sampel		649,387,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			649,387,700	
TOTAL									2,347,905,850				2,347,905,850	

Tabel 14.Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2022 UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
2	11																9,293,040,700	12,064,052,910
2	11	01															3,142,306,500	4,068,098,450
2	11	01	1.02														39,460,200	51,298,260
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase aset yang tercatat		Kota Banjarbaru		12 Bulan						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51,298,260
2	11	01	1.05														137,150,000	178,295,000
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian kerja		Kota Banjarbaru		83 Stell						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93,795,000
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/bimtek yang mendapatkan sertifikat kompetensi		Kota Banjarbaru		5 Orang						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84,500,000
2	11	01	1.06														774,137,780	989,479,114
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		Kota Banjarbaru		12 Bulan						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah pemenuhan Laporan Dokumentasi Surat Menyurat Jumlah Pemenuhan penyediaan alat tulis kantor		Kota Banjarbaru		12 Bulan 12 Bulan						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61,517,014
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah pemenuhan Pengisian Bahan Bakar Minyak		Kota Banjarbaru		12 Bulan						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	348,983,986
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kota Banjarbaru		12 Bulan						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8,033,584
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Banjarbaru		12 Bulan						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6,760,000
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke dalam daerah Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah		Semua Kab/Kota		12 Bulan 12 Bulan						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	564,184,530
2	11	01	1.07														1,100,000,000	1,430,000,000
2	11	01	1.07															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kota Banjarbaru		1 Unit		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis mebel yang dilakukan pengadaan		Kota Banjarbaru		2 Jenis		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			260,000,000
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis Peralatan yang dilakukan pengadaan		Kota Banjarbaru		2 Jenis		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			260,000,000
2	11	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase pemenuhan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor yang dibutuhkan		Kota Banjarbaru		1 Jenis		600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			780,000,000
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						857,142,520				1,114,285,276		
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pemenuhan Ketersediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Banjarbaru		12 Bulan		347,282,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			451,467,276
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD Jumlah pemenuhan pelayanan kebersihan dan keamanan Kantor		Kota Banjarbaru		12 Bulan 12 Bulan		509,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			662,818,000
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						234,416,000				304,740,800		
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pemenuhan kendaraan dinas/operasional roda 2,3,4 dan minibus yang terurus administrasinya		Kota Banjarbaru		12 Bulan		208,416,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			270,940,800
2	11	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor		Kota Banjarbaru		12 Bulan		26,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,800,000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						6,150,734,200				7,995,954,460		
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						6,150,734,200				7,995,954,460		
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional		Persentase sampah yang di proses di TPA Regional Banjarkakula		Kota Banjarbaru		100 %		1,161,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,510,437,500
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional		Persentase pemenuhan pemeliharaan fasilitas dan sarana prasarana TPAS regional		Kota Banjarbaru		100 %		1,269,143,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,649,886,160

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Jumlah sampah yang di tangani di TPA Regional Banjarbakula		Kota Banjarbaru		36000 Ton/Tahun		3,719,716,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,835,630,800
TOTAL										9,293,040,700				12,064,052,910			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut merupakan usulan bidang lingkungan hidup yang terangkum dalam aplikasi e-planning dan dibahas dalam musrenbang Provinsi Kalsel tahun 2022:

Tabel 15. Usulan Program dan Kegiatan dari Instansi Bidang Lingkungan Hidup di Kalsel

Tgl Pengajuan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien	Alamat	SKPD Tujuan	Rekomendasi Setwan
17-02-2021	GUSTI MITAHUL CHOTIMAH, SE	Kurangnya pengelolaan dan pengembangan limbah dari perusahaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional (Lintas Daerah Kab/Kota)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5 m	Desa Jorong, Kab. Tanah Laut, Jorong, Jorong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 5 m Anggaran : 0
17-02-2021	GUSTI MITAHUL CHOTIMAH, SE	kurangnya pengelolaan sampah baik berupa TPA/TPST/SPA	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Lintas Daerah Kabupaten/Kota)	Lingkungan Hidup	10 unit	Desa Kemuning Rt.2, Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 10 unit Anggaran : 0
17-02-2021	ISKANDAR ZULKANAIN, SE	permasalahan limbah perusahaan yang mencemari lingkungan sungai desa satu timur	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	4 km	desa satu timur kec.satu kab.tanah bumbu, Kab. Tanah Bumbu, Satu, Satu Timur	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 4 km Anggaran : 0
18-02-2021	H. M. ROSEHAN NOOR BAHRI, SH	Saya memohon dengan kerendahan hati agar masalah tempat pembuangan sampah di depan pasar baimbai dan jalannya agar diperbaiki karena sampahnya mengganggu jalan dan masyarakat sekitar.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Lintas Daerah Kabupaten/Kota)	Lingkungan Hidup	1 TPS	Jl.Kelayan B Gg. Ar-Rauddah, Rt.6, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Kelayan Timur	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 1 TPS Anggaran : 0
18-02-2021	BURHANUDDIN	masyarakat desa mohon bantuan untuk pengangkutan sampah di tempat tinggal warga, karena sampah selalu menumpuk di tempat tinggal warga. kekurangan alat operasional untuk angkut sampah. Perlunya alat angkut roda tiga	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Lintas Daerah Kabupaten/Kota)	Lingkungan Hidup	2 Buah	Desa Sejakah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru., Kab. Kotabaru, Pulaulaut Timur, Sejakah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 2 Buah Anggaran : 0
18-02-2021	H. M. ROSEHAN NOOR BAHRI, SH	Sungai Jingham memiliki potensi yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya kain sasirangan, namun pengelolaan limbah masih di buang ke sungai yang pasti nanti akan merusak lingkungan, tolong di buatkan tempat penampungan limbah Sementara/ Tempat penampungan limbah.	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lingkungan Hidup	1 Gedung	Jalan Simpang Jahri Saleh RT.19 Gg.Melati, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara, Sungai Jingham	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 1 Gedung Anggaran : 0

Tgl Pengajuan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Urusan	Koefisien	Alamat	SKPD Tujuan	Rekomendasi Setwan
18-02-2021	H. BURHANUDDIN, S.Sos. M.Pd	Bantuan tosa untuk angkutan sampah	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Lintas Daerah Kabupaten/Kota)	Lingkungan Hidup	2 buah	Kelurahan Kampung Baru, Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Kampung Baru	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 2 buah Anggaran : 0
18-02-2021	H. BURHANUDDIN, S.Sos. M.Pd	bantuan tosa untuk angkutan sampah	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Lintas Daerah Kabupaten/Kota)	Lingkungan Hidup	2 desa	Desa Sejahtera dan Desa Mantawakan Mulia, Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 2 desa Anggaran : 0
18-02-2021	BURHANUDDIN	mohon pengadaan tempat sampah untuk warga desa	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Lintas Daerah Kabupaten/Kota)	Lingkungan Hidup	100 Buah	Desa Tirawan Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, Kab. Kotabaru, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 100 Buah Anggaran : 0
19-02-2021	HJ. DEWI DAMAYANTI SAID, SE, MM	permintaan tosa angkutan sampah untuk warga tanjung pagar RT 05.	Pengadaan alat angkut roda 3	Pertanian	1 unit	kelurahan tanjung pagar RT.05, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Tanjung Pagar	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
19-02-2021	HJ. DEWI DAMAYANTI SAID, SE, MM	permintaan tosa angkutan sampah untuk warga alalak utara RT. 21	Pengadaan alat angkut roda 3	Pertanian	1 unit	jalan hksn komplek amd permai blok b1 rt. 21, Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara, Alalak Utara	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 1 unit Anggaran : 0
19-02-2021	Ir. H. AGUS MULIA HUSIN	di buat Ruang Terbuka Hijau untuk lingkungan dan pemeliharaan dan kebersihan sungai kemuning secara rutin untuk memprlancar air mengalir untuk menghindari banjir	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	1 buah	di loktabat selatan RT.01 RW.01 sungai kemuning, Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Dilanjutkan Ketahap Berikutnya Koefisien : 1 buah Anggaran : 0

Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	OPD Tujuan
Lingkungan Hidup	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Mohon fasilitasi pelatihan PPLHD dikarenakan PPLHD berwenang melakukan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan sedangkan di Kabupaten Tanah Laut kekurangan SDM sebagai PPLHD	DPRKPLH Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Laut, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pembangunan nasional 2019-2024 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut:

Tabel 16.Sasaran Utama Pembangunan Nasional di Bidang Lingkungan Hidup

No.	Pembangunan	Baseline 2019	Target 2024
a.	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar	22,6% di tahun 2018	27,3%
b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65.1	69.7

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta depleksi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan

kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

Dalam pembangunan nasional 2019-2024 mempertimbangkan lingkungan dan isu strategis sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

1. Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan

2. Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tingginya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak lepas dari masih maraknya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup; seperti illegal logging, pembakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, tumpahan minyak di laut, perusakan terumbu karang, penguasaan hutan non-prosedural, dan pencemaran limbah B3. Bahkan kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, illegal logging, penggunaan kawasan hutan, dan kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

1. Tingginya Risiko Bencana di Indonesia

Dalam World Risk Report (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena

tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana. Bahkan hampir 75 persen infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan/bahaya.

2. Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi

Indonesia adalah wilayah yang terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif. Berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa (Pusgen 2018) segmen-segmen sesar aktif yang berpotensi menghasilkan gempa di atas skala magnitude 6,5 diidentifikasi mencapai 280 sesar (Gambar 7.4). Hal ini menunjukkan banyaknya potensi lokasi yang dilintasi oleh sesar aktif dan terancam bahaya guncangan gempa serta deformasi oleh pergerakan sesar

3. Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan Iklim

Tren bencana hidrometeorologi semakin meningkat di Indonesia dipengaruhi oleh variabilitas iklim ekstrem jangka pendek dan pengaruh perubahan iklim. Dalam jangka pendek, dapat dirasakan bahwa peristiwa iklim ekstrem semakin sering terjadi, sementara dalam jangka panjang temperatur permukaan bumi akan mengalami peningkatan yang signifikan dari kondisi saat ini.

4. Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana di Daerah

Penguatan kerja sama dan tata kelola bencana di daerah merupakan mandat UU No. 23/2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Terlebih, melalui terbitnya PP No. 2/2018 dan Permendagri 101/2018 yang mengamatkan pembenahan mekanisme kerja sama antar kelembagaan di daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana.

Pembangunan Rendah Karbon

1. Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi GRK melalui Pembangunan Rendah Karbon

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Indonesia menjadi

salah satu negara yang mendukung berbagai upaya dalam rangka menanggulangi perubahan iklim. Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan usaha sendiri, dan mencapai 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Dalam pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris komitmen ini ditingkatkan menjadi penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional di bawah baseline emisi GRK tahun 2030

2. Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon

Penerapan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan

Sasaran, target, dan indikator outcome untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dikelompokkan sebagai berikut:



Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana

dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

- 1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (f) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swastadan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (g) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (h) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
- 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
- 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan

Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.

4. **Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. **Penanggulangan Bencana**, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; (d) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; (e) Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana; (f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan (i) Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan (j) Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
2. **Peningkatan Ketahanan Iklim**, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor

prioritas, melalui: (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.

Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, yakni meliputi bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

- 1. Pembangunan Energi Berkelanjutan**, yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan Konservasi Energi.
- 2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan** yang dilaksanakan melalui: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan.
- 3. Pengelolaan Limbah** yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
- 4. Pengembangan Industri Hijau** yang dilaksanakan melalui: (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; serta (c) Manajemen Limbah Industri.
- 5. Rendah Karbon Pesisir dan Laut** yang dilaksanakan melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

Tabel17. Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Kalsel

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	RPJMN 2020 - 2024	

Sehubungan dengan kebijakan nasional tersebut, kebijakan di Provinsi Kalimantan Selatan yang berkaitan adalah mengenai kebijakan seperti hal-hal berikut:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
3. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
7. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
8. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
9. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
10. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi
11. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
12. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
13. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup

Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatkan nilai SAKIP Dinas LH.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Tahun 2022, program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel sebanyak 11 program, yang terdiri atas 1 program rutin dan 10 program non rutin. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 20 kegiatan, 7 kegiatan rutin dan 13 kegiatan non rutin. Pagu usulan sebesar Rp. 32.680.702.793,- dengan program rutin sebesar Rp. 17.543.647.393 ,- dan Non Rutin sebesar Rp. 15.137.055.400,-.

Untuk UPT Laboratorium Lingkungan, direncanakan melaksanakan sebanyak 2 program, yang terdiri atas 1 program rutin dan 1s program non rutin. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 7 kegiatan, 6 kegiatan rutin dan 1 kegiatan non rutin. Pagu usulan sebesar Rp. 2.581.096.550,- dengan program rutin sebesar Rp. 1.831.548.550,- dan Non Rutin sebesar Rp. 749.548.000,-.

Untuk UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula, direncanakan melaksanakan sebanyak 2 program,yang terdiri atas 1 program rutin dan 1 program non rutin. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 7 kegiatan, 6 kegiatan rutin dan 1 kegiatan non rutin. Pagu usulan sebesar Rp. 8.006.775.000 ,- dengan program rutin sebesar Rp. 3.140.697.700,- dan Non Rutin sebesar Rp. 4.866.077.300,-.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berlokasi di lingkungan kantor, sekolah, beberapa perusahaan pada 13 kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan RPJMD Kalsel yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel yakni meningkatkan daya saing perekonomian dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah.Misi kelima memiliki sasaran yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah.

Pada Tahun 2022 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yakni:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 18 Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan DLH Prov Kalsel 2022

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
2	11	001	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2	11	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Kabupaten/Kota	Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP	29.5 Poin	
							Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100%	
2	11	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjarbaru	Nilai komponen Pelaporan pada SAKIP	14.2 Poin	
2	11	001	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	11	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	
2	11	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	
2	11	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Banjarbaru	Jumlah laporan kinerja keuangan dan aset yang disusun	5 Laporan	
2	11	001	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	11	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarbaru	Jumlah penyediaan pakaian kerja	112 Stell	
2	11	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjarbaru	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/bimtek yang mendapatkan sertifikat kompetensi	8 Orang	
2	11	001	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	11	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	
2	11	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Laporan Dokumentasi Surat Menyurat	12 Bulan	
							Jumlah Pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
2	11	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Pengisian Bahan Bakar Minyak	12 Bulan	
2	11	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	
2	11	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	
2	11	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke dalam daerah	12 Bulan	
							Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	
2	11	001	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	11	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjarbaru	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	
2	11	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	2 Jenis	
							Jumlah jenis Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	2 Jenis	
2	11	001	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	11	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Ketersediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	
2	11	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD	12 Bulan	
							Jumlah pemenuhan pelayanan kebersihan dan keamanan Kantor	12 Bulan	
2	11	001	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	11	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan kendaraan dinas/operasional roda 2,3,4 dan minibus yang terurus administrasinya	12 Bulan	
2	11	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	
2	11	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor	12 Bulan	
							Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	002	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				
2	11	2	1.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	13 Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen PPLH yang diselesaikan	1 Dokumen	
							Jumlah pemetaan sumber pencemar	2 Sektor	
2	11	002	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				
2	11	2	1.02	4	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	13 Kabupaten /Kota	Persentase dokumen lingkungan yang diproses sesuai ketentuan	100%	
							Persentase PPLH dan KLHS Kab/Kota yang di validasi/verifikasi	100%	
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	003	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
2	11	3	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	13 Kabupaten /Kota	Jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udaranya (78 sampel)	13 Kab/Kota	
							Jumlah sungai yang dipantau kualitasnya (95 sampel)	13 Kab/Kota	
2	11	3	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	13 Kabupaten /Kota	Persentase emisi GRK yang dihitung	100%	
2	11	003	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
2	11	3	1.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				
2	11	3	1.02	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
2	11	3	1.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
2	11	003	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
2	11	3	1.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Banjar,	Jumlah Lokasi yang dilakukan pemulihan	1 Sungai	

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	11	3	1.03	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	13 Kabupaten /Kota	Luas Lahan Akses Terbuka yang diinventarisir	5000 Ha	
							Luas lahan gambut rusak yang direstorasi	2000 Ha	
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
2	11	004	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				
2	11	4	1.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
2	11	4	1.01	3	Pengelolaan Kebun Raya				
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
2	11	005	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2	11	5	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	13 Kabupaten /Kota	Persentase pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3	100%	
2	11	5	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kota Banjarbaru,	Jumlah incinerator limbah medis	1 Unit	
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
2	11	006	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				
2	11	6	1.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	13 Kabupaten /Kota	Persentase Perusahaan yang diawasi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	100%	
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
2	11	007	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				
2	11	7	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	13 Kabupaten /Kota	Jumlah MHA dan kearifan lokal terkait PPLH	6 Balai Adat	
							Persentase peserta sosialisasi/bimtek/seminar yang memahami tentang PPLH	100%	
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	11	008	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	11	8	1.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	13 Kabupaten /Kota	Jumlah Institusi/dunia usaha/komunitas yang terlibat dalam pelestarian fungsi LH	75 Mitra	
							Jumlah Kab/Kota yang meraih penghargaan sebagai kota bersih	8 Kab/Kota	
							Jumlah Kampung Iklim yang mendapatkan apresiasi dari KLHK	26 Lokasi	
							Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata	32 Sekolah	
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	11	009	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				
2	11	9	1.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13 Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	1 Dokumen	
							Persentase perusahaan dengan peringkat kinerja biru dan/atau hijau	90%	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	010	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				
2	11	10	1.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	13 Kabupaten /Kota	Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH	100%	
2	11	10	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	13 Kabupaten /Kota	Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang	100%	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
2	11	011	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				
2	11	11	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	13 Kabupaten /Kota	Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga	74%	
							Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	24%	
2	11	11	1.01	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Kab. Banjar,	Jumlah Persil Lahan yang dibebaskan	0 Persil	

Tabel 19 Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan 2022

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
2	11	001	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	11	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	
2	11	001	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	11	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarbaru	Jumlah penyediaan pakaian kerja	20 Stell	
2	11	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjarbaru	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/bimtek yang mendapatkan sertifikat kompetensi	15 Orang	
2	11	001	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	11	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bulan	
2	11	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Laporan Dokumentasi Surat Menyurat	12 bulan	
							Jumlah Pemenuhan penyediaan alat tulis kantor		
2	11	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Pengisian Bahan Bakar Minyak	12 bulan	
2	11	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	
2	11	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	
2	11	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke dalam daerah	12 bulan	
							Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah		
2	11	001	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	11	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Banjarbaru	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Perlengkapan Kantor	16 buah	
2	11	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	5 buah	
							Jumlah jenis Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pengadaan		
2	11	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	10 buah	
2	11	001	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	11	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banjarbaru	Jumlah Pemenuhan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	
2	11	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD	12 bulan	

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
							Jumlah Parameter Terakreditasi	25 Parameter	
							Jumlah pemenuhan pelayanan kebersihan dan keamanan Kantor	12 Bulan	
2	11	001	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	11	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan kendaraan dinas/operasional roda 2,3,4 dan minibus yang terurus administrasinya	12 bulan	
2	11	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor	12 bulan	
							Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	003	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
2	11	3	1.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Kota Banjarbaru	Jumlah Sampel Pelanggan yang dapat diambil/diuji	650 Sampel	

Tabel 20 Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
2	11	001	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	11	1	1.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	
2	11	001	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	11	1	1.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarbaru	Jumlah penyediaan pakaian kerja	83 Stell	
2	11	1	1.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjarbaru	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/bimtek yang mendapatkan sertifikat kompetensi	5 Orang	
2	11	001	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	11	1	1.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	
2	11	1	1.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Laporan Dokumentasi Surat Menyurat	12 Bulan	
							Jumlah Pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
2	11	1	1.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Pengisian Bahan Bakar Minyak	12 Bulan	
2	11	1	1.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	
2	11	1	1.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	
2	11	1	1.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke dalam daerah	12 Bulan	
							Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	
2	11	001	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	11	1	1.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjarbaru	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	
2	11	1	1.0 7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	2 Jenis	
							Jumlah jenis Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	2 Jenis	
2	11	001	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	11	1	1.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan Ketersediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	
2	11	1	1.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarbaru	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD	12 Bulan	
							Jumlah pemenuhan pelayanan kebersihan dan keamanan Kantor	12 Bulan	
2	11	001	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	11	1	1.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan kendaraan dinas/operasional roda 2,3,4 dan minibus yang terurus administrasinya	12 Bulan	
2	11	1	1.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarbaru	Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor	12 Bulan	
							Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
2	11	011	1.0 1		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				
2	11	11	1.0 1	2	Pemrosesan Akhir di TPA/ TPST Regional	13 Kabupaten /Kota	Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga	74%	
2	11	11	1.0 1	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional		Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	24%	
2	11	11	1.0 1	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional	Kab. Banjar,	Jumlah Persil Lahan yang dibebaskan	0 Persil	

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21 .Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas LH Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21 .Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas LH Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										32,680,702,793		36,272,781,436					
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										17,543,647,393		18,541,475,061				
2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										399,253,200		399,253,500			
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Persentase dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	100	29,5 Poin 100 %	100 %	339,253,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	339,253,500		
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Nilai komponen Pelaporan pada SAKIP	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	14,2 Poin	100 %	59,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	60,000,000		
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													12,729,943,723		12,801,943,723
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	14 Bulan	100 %	12,366,943,723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	12,366,943,723		
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa administrasi keuangan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	288,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	360,000,000		
2	11	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah laporan kinerja keuangan dan aset yang disusun	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	5 Laporan	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	75,000,000		
2	11	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													178,509,000		143,202,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	Jumlah penyediaan pakaian kerja	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	115 stel	100 %	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	100	42,000,000
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/bimtek yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Semua Kab/Kota	100	10 orang	100 %	130,509,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	100	101,202,500
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,497,849,300					1,585,432,250
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	31,213,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	100	31,243,500
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	Jumlah pemenuhan Laporan Dokumentasi Surat Menyurat umlah Pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Semua Kab/Kota	100	12 Bulan 12 Bulan	100 %	73,744,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	100	64,850,000
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	Jumlah pemenuhan Pengisian Bahan Bakar Minyak	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	269,791,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	100	295,000,000
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	19,435,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	100	19,435,500
2 11 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	113,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	100	142,125,000
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke dalam daerah Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Semua Kab/Kota	100	12 Bulan 12 Bulan	100 %	989,965,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	100	1,032,776,250
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								477,680,000					1,080,200,000
2 11 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	1 Unit	100 %	343,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	100	430,200,000
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan Jumlah jenis Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	1 Jenis 3 Jenis	100 %	132,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	100	650,000,000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								956,592,470					1,146,296,838

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 11 01 1.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Ketersediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	335,999,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	419,999,330
2 11 01 1.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD Jumlah pemenuhan pelayanan kebersihan dan keamanan Kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan 12 Bulan	100 %	620,593,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	726,297,500
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,303,819,700					1,383,146,250
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan kendaraan dinas/operasional roda 2,3,4 dan minibus yang terus administrasinya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	424,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	432,567,500
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	700,759,700			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	890,933,750
2 11 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan 12 Bulan	100 %	96,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	61,625,000
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								672,134,200					672,134,500
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi								371,626,000					371,626,125

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Jumlah dokumen PPLH yang diselesaikan Jumlah Pemetaan Jasa Lingkungan Persentase Dokumen PPLH Kab/Kota yang diValidasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	31,24	1 Dokumen 2 Sektor 100 %	69,5 Poin	371,626,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,24	371,626,125				
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi													300,508,200			300,508,375

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Persentase KLHS Kab/Kota yang di verifikasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	51,24	0 - 100 %	69.5 Poin	300,508,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,24	300,508,375		
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																4,923,160,800	4,921,171,875
2	11	03	1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup															1,451,050,700	1,451,050,875

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air (IKA)	Jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udaranya (39 sampel) Jumlah sungai yang dipantau kualitasnya (76 sampel)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	58,01	13 Kab/Kota 13 Kab/Kota	69,5 Poin	1,157,771,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,01	1,157,771,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persentase emisi GRK yang dihitung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	58,01	100 %	69,5 Poin	293,279,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,01	293,279,075		
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													349,989,000	350,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Indeks Kualitas Air (IKA)	Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	58,01	1 Dokumen	69.5 Poin	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,01	350,000,000
2	11 03 1.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diisolasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Barito Kuala Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Tanah Bumbu	58,01	1 Kegiatan	69.5 Poin	199,989,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,01	200,000,000
2	11 03 1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								2,922,121,100				2,920,121,000
2	11 03 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Jumlah Lokasi yang dilakukan pemulihan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Hulu Sungai Tengah Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin	51,24	2 Lokasi	69.5 Poin	1,041,368,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,24	2,500,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Luas Lahan Akses Terbuka yang diinventarisir Luas lahan gambut rusak yang direstorasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	51,24	5000 Ha 2000 Ha	69,5 Poin	1,680,753,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,24	420,121,000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1,124,999,600				1,500,000,000			
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi					1,124,999,600				1,500,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Dokumen Kajian Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	51,24	1 Dokumen	69.5 Poin	325,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,24	500,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	04	1.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Jumlah Kebun Raya yang dikelola	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	51,24	1 Lokasi	69.5 Poin	399,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,24	500,000,000
2	11	04	1.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	51,24	1 Lokasi	69.5 Poin	399,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,24	500,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								849,996,600				1,300,000,000
2	11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								849,996,600				1,300,000,000
2	11 05 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persentase pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	50,01	100 %	66,63 Poin	299,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,01	300,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Jumlah LB3 Yang dikelola	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	50,01	0,201 Juta Ton/Tahun	66,63 Poin	549,997,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,01	1,000,000,000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				694,828,000									750,000,000
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				694,828,000									750,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persentase Perusahaan yang diawasi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	30,01	100 %	69,5 Poin	694,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	30,01	730,000,000
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			291,030,000					330,000,000				
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			291,030,000					330,000,000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 07 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Jumlah MHA dan kearifan lokal terkait PPLH Persentase peserta sosialisasi/bimtek/ seminar yang memahami tentang PPLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	51,24	6 Balai Adat 100 %	69,5 Poin	291,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,24	350,000,000
2	11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							2,000,000,000					4,000,000,000
2	11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi							2,000,000,000					4,000,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Jumlah Institusi/dunia usaha/komunitas yang terlibat dalam pelestarian fungsi LH Jumlah Kab/Kota yang meraih penghargaan sebagai kota bersih Jumlah Kampung iklim yang mendapatkan apresiasi dari KLHK Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/Komunitas masyarakat Peduli dan Berbudaya LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kab/Kota Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	58,01	75 Mitra 8 Kab/Kota 26 Lokasi 32 Sekolah	69,5 Poin	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,01	4,000,000,000	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												750,000,000	
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi													750,000,000

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Jumlah perusahaan dengan peringkat kinerja biru dan/atau hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Kotabaru Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	38,01	26 Perusahaan	69,5 Poin	567,508,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	38,01	750,000,000	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP													450,000,000
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi													450,000,000
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Kotabaru Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	38,01	100 %	69,5 Poin	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	38,01	200,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	58,01	100 %	69,5 Poin	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,01	250,000,000		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														3,038,000,000
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														3,038,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Indeks Kualitas Air (IKA)	Jumlah Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu	50,01	1 Kegiatan	69,5 Poin	260,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,01	300,000,000	
TOTAL													32,680,702,793					30,272,781,436

Tabel 22. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							2,581,096,550					2,347,905,850			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1,831,548,550				1,698,518,150			
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							122,400,000				122,400,000		
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa administrasi keuangan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 bulan	100 %	122,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	122,400,000
2	11	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							132,513,400				123,306,400		
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah penyediaan pakaian kerja	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	20 stell	100 %	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	6,000,000
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/bimtek yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	15 orang	100 %	124,113,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	117,306,400
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							255,417,800				238,338,900		
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 bulan	100 %	2,592,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	2,592,000
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Laporan Dokumentasi Surat Menyurat Jumlah Pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 bulan 12 bulan	100 %	24,475,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	35,804,400
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Pengisian Bahan Bakar Minyak	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 bulan	100 %	29,846,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	30,832,700
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 bulan	100 %	13,202,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	17,347,800
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 bulan	100 %	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	3,000,000
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke dalam daerah Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Semua Kab/Kota	100	12 bulan 12 bulan	100 %	180,502,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	148,762,000
2	11	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							581,468,000				562,328,850		
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Perlengkapan Kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	16 buah	100 %	14,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	23,066,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	5 buah	100 %	535,428,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	506,628,000
2	11 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	10 buah	100 %	31,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	32,634,850
2	11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								491,919,350				442,814,000
2	11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah Pemenuhan Jasa Surat Menyurat	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 bulan	100 %	1,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	997,000
2	11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD Jumlah Parameter Terakreditasi Jumlah pemenuhan pelayanan kebersihan dan keamanan Kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 bulan 25 parameter 12 bulan	100 %	490,519,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	441,817,000
2	11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								247,830,000				209,330,000
2	11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan kendaraan dinas/operasional roda 2,3,4 dan minibus yang terurus administrasinya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 bulan	100 %	74,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	74,680,000
2	11 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Semua Kab/Kota	100	12 bulan 12 bulan	100 %	173,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	134,650,000
2	11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								749,548,000				649,387,700
2	11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								749,548,000				649,387,700
2	11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Udara (IKU)	Jumlah Sampel Pelanggan yang dapat diambil/diuji	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kota Banjarbaru	58,01 51,24 Poin 86,88 Poin	650 sampel	68.63 poin	749,548,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Udara (IKU)	58,01 51,24 Poin 86,88 Poin	649,387,700
TOTAL										2,581,096,550				2,347,905,850

Tabel 23.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPT D TPAS Regional Banjarkakula Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								8,006,775,000				10,335,266,630			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								3,140,697,700				4,009,366,140		
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								303,780,000				512,982,600	
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa administrasi keuangan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	303,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	512,982,600
2	11	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								268,400,000				184,600,000	
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah penyediaan pakaian kerja	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	56 Stell	100 %	77,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	100,100,000
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis/bimtek yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Semua Kab/Kota	100	5 Orang	100 %	191,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	84,500,000
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								740,094,700				934,833,640	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	12,143,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	15,785,900
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Laporan Dokumentasi Surat Menyurat Jumlah Pemenuhan penyediaan alat tulis kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan 12 Bulan	100 %	82,615,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	107,399,890
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Pengisian Bahan Bakar Minyak	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	180,402,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	234,523,640
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	4,753,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	6,179,680
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	6,760,000
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke dalam daerah Jumlah pemenuhan Pelaksanaan rapat/pertemuan/koordinasi ke luar daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Semua Kab/Kota	100	12 Bulan 12 Bulan	100 %	455,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	564,184,530
2	11	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								611,884,000				795,449,200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
2 11 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	1 Unit	100 %	38,901,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	50,571,300	
2 11 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah Jenis Pengadaan Alat Rumah Tangga / mebel yang dilakukan pengadaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	2 Jenis	100 %	82,928,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	107,806,400	
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah jenis Peralatan gedung kantor yang dilakukan pengadaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	2 Jenis	100 %	154,765,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	201,194,500	
2 11 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	1 Buah	100 %	335,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	435,877,000	
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								946,869,000					1,230,929,700	
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan Ketersediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	282,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	366,600,000	
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai maupun tamu SKPD Jumlah pemenuhan pelayanan kebersihan dan keamanan Kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan 12 Bulan	100 %	664,869,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	864,329,700	
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								269,670,000					350,571,000	
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan kendaraan dinas/operasional roda 2,3,4 dan minibus yang terurus administrasinya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan	100 %	234,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	304,902,000	
2 11 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Banjarbaru	100	12 Bulan 12 Bulan	100 %	35,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	45,669,000	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								4,866,077,300					6,325,900,490	
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								4,866,077,300					6,325,900,490	
2 11 11 1.01 02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persentase sampah yang di proses di TPA Regional Banjarkakula	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kota Banjarbaru	58,01	100 %	69.5 Poin	952,846,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Air (IKA)	58,01	1,238,699,800	
2 11 11 1.01 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Indeks Kualitas Air (IKA)	Persentase pemenuhan pemeliharaan fasilitas dan sarana prasarana TPAS regional	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kota Banjarbaru	58,01	100 %	69.5 Poin	1,076,963,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kualitas Air (IKA)	58,01	1,400,051,900	

BAB V

PENUTUP

Seiring dengan pesatnya pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, permasalahan lingkungan akan semakin meningkat sehingga kesadaran masyarakat, pengusaha yang mengeksploitasi sumber daya alam sangat diharapkan partisipasinya dalam rangka mengolah alam menjadi ramah lingkungan. Demikian juga dengan kegiatan pembangunan lainnya, yang akan memberikan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin berat.

Dengan program dan kegiatan di DLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ini hendaknya mampu menimalisir masalah lingkungan yang dimotori oleh aparaturnya sebagai kunci keberhasilan melalui Rencana Kerja. Oleh sebab itu tugas dan fungsi DLH Provinsi Kalimantan Selatan perlu pula ditunjang oleh anggaran yang memadai disamping dukungan komitmen dari semua pihak (masyarakat, pengusaha maupun instansi terkait) agar dimasa yang akan datang pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi kini dan mendatang terlaksana dengan baik. Rencana Kerja Tahun 2022 diharapkan menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Renja Dinas LH Tahun 2022 ini selain menguraikan Rencana Kerja untuk Dinas sendiri, juga memuat Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula. UPT yang baru dua tahun berdiri ini tentunya memerlukan dukungan dana yang besar untuk mengoperasionalkan dan menunjang kegiatan sehari-harinya dimana secara umum tupoksi kedua UPT ini berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Demikian Renja 2021 ini dibuat untuk dapat menjadi acuan selanjutnya menyusun program kegiatan dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.